RENCANA KERJA TH. 2027







DIsusun Oleh :

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. TEMANGGUNG

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Kepala Bidang Perencanaan, Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Verifikator
Ir. GUNADI, MM	**YEHEZKIEL ESANDA PUTRA, S.I.P**
NIP. 19680721 200701 1 017	NIP. 19990103 202202 1 001

Mengetahui
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2027 merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yang disusun sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode 2025 – 2029 yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun, sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan yang meliputi urusan pemerintah di bidang pertanian, pangan dan perikanan yang dirumuskan dengan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun 2027 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2026, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Renstra, pagu indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Temanggung, Juli 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19710630 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 7
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DKPPP Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024–2026 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 32
2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) 32
2.2.2. Data Pokok 54
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKPPP 106
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 109
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 124
2.6. Inovasi Perangkat Daerah 124
2.7. Penghargaan 124

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 128
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 128
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DKPPP 128

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 156
4.1. Program dan Kegiatan 156

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 178

BAB VI PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 Kabupaten Temanggung 12

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung 28

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung 28

Tabel 2.4. Capaian kinerja IKP Kabupaten Temanggung 32

Tabel 2.5. Skor Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten Temanggung 36

Tabel 2.6. Capaian Angka Konsumsi Ikan Tahun 2021- 2026 TW II 38

Tabel 2.7. Daftar Kegiatan Gemarikan dan Paket Bantuan Gemarikan 41

Tabel 2.8. Capaian Rasio PDRB Sektor Pertanian Tahun 2026 TW II 43

Tabel 2.9. Realisasi Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung 45

Tabel 2.10. Realisasi Persentase Ketersediaan Pangan Pokok 47

Tabel 2.11. Capaian Persentase Penanganan Kerawanan Pangan 49

Tabel 2.12. Capaian Persentase bahan pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman 51

Tabel 2.13 Rekapitulasi Hasil Uji Pangan segar asal Tumbuhan 51

Tabel 2.14 Capaian Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 53

Tabel 2.15. Daftar Pemberian Bantuan Benih Ikan untuk Restocking Ikan 55

Tabel 2.16. Capaian Jumlah Produksi Pengolahan Ikan 55

Tabel 2.17. Daftar Penerima Sarana Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025 56

Tabel 2.18. Realisasi Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan 58

Tabel 2.19. Capaian Jumlah produksi pengolahan ikan Tahun 2021-2026 TW II 59

Tabel 2.20. Daftar Penerima Sarana Pengolahan hasil perikanan Tahun 2025 60

Tabel 2.21. Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2021-2026 TW II 62

Tabel 2.22. Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura 2021-2026 TW II 64

Tabel 2.23. Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan 2021-2026 TW II 69

Tabel 2.24. Jumlah Produksi Ternak Unggas 2021-2026 TW II 71

Tabel 2.25. Jumlah Produksi Telur 2021-2026 TW II 72

Tabel 2.26. Jumlah Produksi Daging ternak besar 2021-2026 TW II 73

Tabel 2.27. Jumlah Produksi Daging ternak kecil2021-2026 TW II 75

Tabel 2.28. Realisasi Persentase kelahiran pedet Tahun 2021-2026 TW II 77

Tabel 2.29. Realisasi Persentase Penanganan penyakit Hewan 80

Tabel 2.30. Rekapitulasi Data Penyakit Hewan Tahun 2026 Triwulan II 81

Tabel 2.31. Realisasi Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat 84

Tabel 2.32. Sampel organ hati Tahun 2026 Triwulan II 85

Tabel 2.33. Realisasi Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya 88

Tabel 2.34. Data Rekapitulasi Bantuan Prasarana Irigasi Usaha Tani 87

Tabel 2.35. Realisasi Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian 89

Tabel 2.36 Realisasi Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas 91

Tabel 2.37 Rekapitulasi Penilaian Penerapan Teknologi Modern 94

Tabel 2.38 Realisasi Persentase kelompok tani yang naik kelas 94

Tabel 2.39. Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas Tahun 2025 94

Tabel 2.40. Rekapitulasi Kelompok Tani yang Naik Kelas Tahun 2025 97

Tabel 2.41. Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 102

Tabel 2.42. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027 103

Tabel 2.43 Daftar Penghargaan 114

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja 118

Tabel 3.2 Rencana program dan kegiatan DKPPP Tahun 2027 121

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan/Pagu Indikatif Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027 124

Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung Tahun 2027 128

Tabel 4.3 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung Tahun 2027 164

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 173

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 174

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

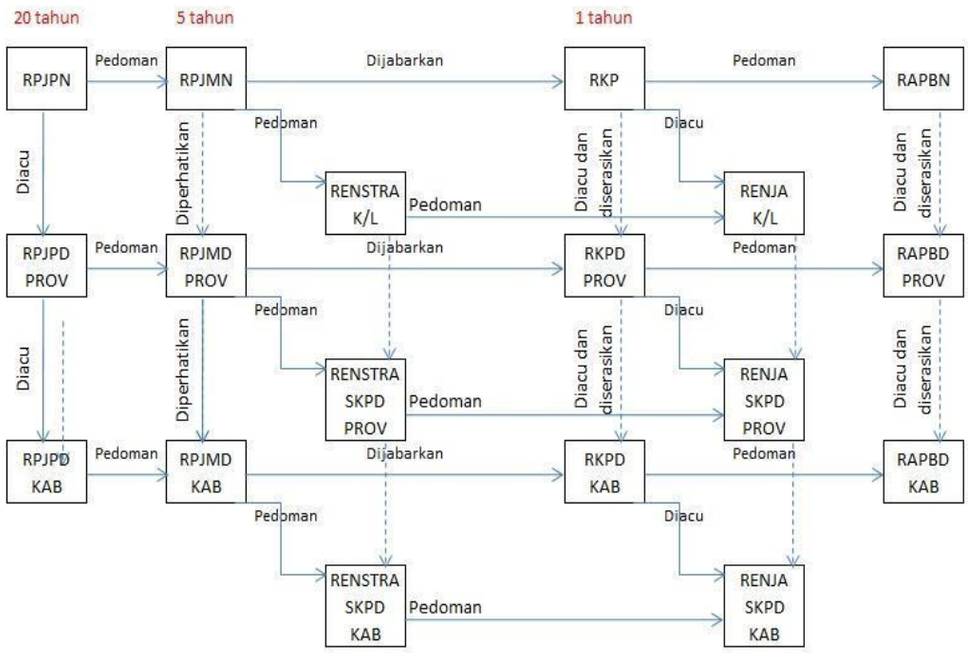
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yang menyangkut aspek:

1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
2) Kondisi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
4) Data Pokok Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;dan
7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk kondisi tahun 2025-2029;
4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

c. Me*review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

   Me*review* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Merumuskan suatu

kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SDG's *(Sustainable Developmnet Goals)*;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pembangunan daerah.

i. **Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;**

   Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. **Telaahan Kebijakan Nasional;**

   Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. **Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;**

   Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. **Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan**

   Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. **Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

   Dokumen rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;

13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DKPPP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026 Kabupaten Temanggung

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD sampai tahun 2026					
				Target Renja PD Tahun 2025		Realisasi Renja PD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				26.887.036.590		24.657.866.634		91,71		47.281.299.559		3.604.413.662		7,62
2.09	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN				26.887.036.590		24.657.866.634		91,71		25.830.043.120		3.604.413.662		13,95
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				26.388.739.590		24.221.479.394				25.685.043.120		3.603.891.662		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	85,4		86,63		100,00		85,35		86,63		100,00	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	74,8		74,80		100,00		74,8		74,80		100,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				24.247.968.309		22.323.894.464		92,07		23.755.118.943	0,00	3.273.346.405		13,78
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	24.247.968.309		22.323.894.464	100,00	92,07	14	23.755.118.943	8,00	3.273.346.405		13,78
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				128.088.000		124.016.546		96,82		157.500.000		11.419.352		7,25
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.500.000	0,00	10.455.135	100,00	99,57	12	15.000.000	6,00	-		0,00
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	37.628.000		37.607.188	100,00	99,94	12	40.000.000	6,00	-		0,00

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD sampai tahun 2026					
				Target Renja PD Tahun 2025		Realisasi Renja PD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	6.000.000		5.997.500	100,00	99,96	12	10.000.000	50,00	-		0,00
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	48.960.000		48.626.000	100,00	99,32	12	45.000.000	6,00	3.146.500		6,99
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	25.000.000		21.330.723	100,00	85,32	12	47.500.000	6,00	8.272.852		17,42
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		-								20,30
2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terbangun	Unit		-		-	-							
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.734.870.381		1.496.309.426		86,25	12	1.523.424.177		309.276.405		20,64
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000		1.500.000	100,00	100,00	12	1.425.000	3,00	-		20,29
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	130.000.000	0,00	115.424.770	100,00	88,79	12	130.000.000	6,00	26.838.493		3,96
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.603.370.381	0,00	1.379.384.656	100,00	86,03	38	1.391.999.177	6,00	282.437.912		0,00
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				277.812.900		277.258.958		99,80	13	249.000.000		9.849.500		1,68

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD sampai tahun 2026					
				Target Renja PD Tahun 2025		Realisasi Renja PD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	123.412.900		123.263.270	100,00	99,88	10	130.000.000	10,00			0,00
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	20.000.000		19.965.000	100,00	99,83		19.000.000	2,00	320.000		
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	120000000		119.635.688	100,00	99,70		100000000	5,00	-		
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	23	14.400.000		14.395.000	100,00	99,97						
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN										25.000.000				
		Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	%	100		98,63		98,63		100		100		100	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										25.000.000				
	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							245.676.500			25.000.000	-			
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				300.000.000		245.676.500	100,00	81,89		25.000.000				
		Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		89,7		89,87		100,00		90,03		89,87			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD sampai tahun 2026					
				Target Renja PD Tahun 2025		Realisasi Renja PD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				300.000.000		245.676.500			1	25.000.000	0,50	-		0,00
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	300.000.000		245.676.500	100,00	81,89		25.000.000	0,50	-		0,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				163.297.000		156.676.890	100,00	95,95						
		Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100		100,00	-	100,00		100		100,00	-	100,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				13.297.000		12.900.000				20.000.000		-		
2.09.03.2.04.0002	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang disusun	Dokumen	1	13.297.000		12.900.000	100,00	97,01	1	20.000.000	0,50	-	40,00	0,00
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				150.000.000	0,00	143.776.890				50.000.000	20,00	522.000		
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100	150.000.000	0,00	143.776.890	100,00	95,85	100	50.000.000	20,00	522.000	90,00	1,04
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				35.000.000	100,00	34.033.850		97,239571		50.000.000				
		Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar (%)	%	100		93,10	-	93,10		100		0,00	-	-	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD sampai tahun 2026					
				Target Renja PD Tahun 2025		Realisasi Renja PD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
	Pelaksanaan Pengawasan Kemanana Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota										50.000.000				
2.09.05 .2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000	100,00	34.033.850	100	97,24		50.000.000				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				254.665.170		254.166.516		99,80						
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										25.000.000		419.000		0
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	TON	140		140,18		100,00		140.2		98,35		70,17	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota										25.000.000				
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil										25.000.000				
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				247.023.670		246.627.661		99,84		25.000.000				
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	TON	10.670,94		10.671, 40		100,00		10,67 2.01		5,506.8			
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				237.023.670		236.672.169				240.000.000		6.880.000		0
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	5	237.023.670	0,00	236.672.169	100,00	99,85	5	215.000.000	0,0058	240.000,00		
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi sera Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan										10.000.000		205.000,00		
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				10.000.000		9.955.492				25.000.000		6.640.000		0

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD sampai tahun 2026					
				Target Renja PD Tahun 2025		Realisasi Renja PD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	10.000.000	0,00	9.955.492	100,00	99,55	1	25.000.000	0,4715	6.640.000	0,5	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				0		-				25.000.000		6.640.000		
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan (%)	%	10				10	10	%	10	10,00	31		10
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai , Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diushakana dalam Kabupaten/Kota							25000000				25000000			
	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan san/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota					0		25000000				25000000		0	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				7.641.500	0,00	7.538.855								
		Jumlah produksi pengolahan ikan	TON	396		395.752		100,00		395,752		288,63			
3.25.06.2.03	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil														
3.25.06.2.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton							11935	70.750.000	60,00	3.067.500		4,34
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah				7.641.500		7.538.855				10.000.000				

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD sampai tahun 2026					
				Target Renja PD Tahun 2025		Realisasi Renja PD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
	Kabupaten/ Kota														
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			7.641.500	0,00	7.538.855	100,00	98,66		10.000.000				
3.27 URUSAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				27.800.290.357	0,00	26.326.453.142		94,70		21.045.506.439		24.225.073		0,12
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				18.910.673.157	0,00	17.811.236.714		94,19		14.876.881.439		18.786.073		0,13
		Produktivitas Padi	ton/ha	6,15		6,09		99,02		6,16		6.11			
		Produktivitas jagung	ton/ha	5,5		5,05		91,82		5.55		5			
		Produktivitas bawang putih	ton/ha	6,05		7,16		100,00		6.15		7.95			
		Produktivitas bawang merah	ton/ha	6,8		8,14		100,00		7.1		8.60			
		Produktivitas cabai rawit	ton/ha	7		7,38		100,00		7.01		7.31			
		Produktivitas cabai keriting	ton/ha	7		7,56		100,00		7.01		7.42			
		Produktivitas tembakau	ton/ha	0.64		0,67		100,00		0.643		0.672			
		Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0.7020		0,73		100,00		0.7250		0.73			
		Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0.400		0,56		84,84		0.41		0.56			
		jumlah produksi ternak unggas	kg	6230875		6537554,12		100,00		807,654		210,263.0			
		jumlah produksi telur	kg	6860985		8888810,54		100,00		268,11		9,048.0			
		Jumlah produksi daging ternak besar	kg	806130		1160527,20		100,00		6,243,337		2,345,957.60			
		Jumlah produksi daging ternak kecil	kg	267584		417341,82		100,00		6,867,846		2,358,939.75			
		Persentase kelahiran pedet	%	48		64,15		100,00		48		53.76			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD sampai tahun 2026					
				Target Renja PD Tahun 2025		Realisasi Renja PD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	36,1		28,86		79,94		37.13		28,86			
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				13.866.497.807	0,00	12.792.585.317				8.087.881.439		17.611.073		
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	12089513607	0,00	11.728.243.867	98	97,01	1	6702881439	0.75	17.511.073		0,26
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1.776.984.200	0,00	1.064.341.450	98	59,90	1	1385000000	0,03		100.000	0,01
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				5.044.175.350	0,00	5.018.651.397				6.789.000.000	55,00			
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2	10.000.000	0,00	9.919.650	100	99,20	2	25.000.000	50,00	-		
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	5.034.175.350	0,00	5.008.731.747	99	99,49	1	6.764.000.000	5,00	1.175.000		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				4.983.647.400		4.949.342.702		99,31	36,1	6.523.625.162	1,36		79,94	
		Persentase Prasarana yang digunakan	%	100		100,00	-	100			100	100,00			100,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				284.875.400	0,00	279.411.250			1	0	0,61	17.511.073		0,26
3.27.03.2.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen							1	45.000.000	0,61	45.000.000		
3.27.03.2.01.0015	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	284.875.400	0,00	279.411.250	100,00	98,08						

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD sampai tahun 2026					
				Target Renja PD Tahun 2025		Realisasi Renja PD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
	Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				4.698.772.000	0,00	4.669.931.452				6.523.625.162	0,75	350.000		
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Unit	4	848.260.000	0,00	839.879.323	100	99,01						
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	1.000.800.000	0,00	996.955.188	100	99,62	4	2.333.625.000	0,00	-		0,00
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	193000000	0,00	191.985.650	100,00	99,47	3	3305000000	0,25	350.000		0,01
3.27.03.2.02.0010	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	20	2.651.740.000	0,00	2.636.512.621	100,00	99,43		100.000.000	0.25	-		0,00
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	4.972.000	0,00	4.598.670	100,00	92,49	1	35.000.000	0,25	-		0,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				458.449.800	0,00	455.816.913		99,43	1	250.000.000		3.649.000		1,46
		Persentase penanganan penyakit hewan	%	85		99,44	-	100		86		99,31	-	100,00	
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	75		79,75	-	100,00		76		80,72	-	100,00	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD sampai tahun 2026					
				Target Renja PD Tahun 2025		Realisasi Renja PD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				59.724.800	0,00	57.759.456		96,71	4	150.000.000	5,00	3.649.000	75	2,43
3.27.04.2.01.0008	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	20	59.724.800	0,00	57.759.456	100	96,71	20	150.000.000	5,00	3.649.000	75	2,43
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				398.725.000	0,00	398.057.457				100.000.000	0,00	-		
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1000	398.725.000	0,00	398.057.457	100	99,83	1000	100.000.000	0,00	-	90	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				0	0,00	-								
		Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	75		94,32		100,00		75	78			96,61	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				3.447.520.000		3.110.056.813		90,21	20	50.000.000		-		
		Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	58		61,88		100		58	58	44,39		-	
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	1,3		1,40	-	100,00		1,3	1.3	1,40		1,40	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				3.447.520.000	0,00	3.110.056.813		90,21		50.000.000				
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	20	2.800.000.000	0,00	2.489.136.813	100	88,90						
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh yang menerima BOP	OB		647.520.000	0,00	620.920.000	100							

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025						Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD sampai tahun 2026					
				Target Renja PD Tahun 2025		Realisasi Renja PD Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
3.27.07.2.01.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit			0,00				20	50.000.000				

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
   a. Persentase penanganan kerawanan pangan
   b. Persentase Prasarana yang digunakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
   a. Rasio PDRB Sektor Pertanian
   b. Angka konsumsi Ikan
   c. Skor Pola Pangan harapan
   d. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan
   e. Produktivitas bawang putih
   f. Produktivitas bawang merah
   g. Produktivitas cabai rawit
   h. Produktivitas cabai keriting
   i. Produktivitas tembakau
   j. Produktivitas kopi robusta
   k. Produktivitas kopi arabika
   l. Persentase kelahiran pedet
   m. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
   n. Nilai AKIP Perangkat Daerah
   o. Persentase penanganan penyakit hewan
   p. Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat
   q. Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian
   r. Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi
   s. Persentase kenaikan kelas kelompok tani
3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
   a. Indeks Ketahanan Pangan
   b. Prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU)
   c. Persentase kesediaan pangan
   d. Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar

e. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
f. Jumlah produksi perikanan budidaya
g. Jumlah produksi pengolahan ikan
h. Produktivitas Padi
i. Produktivitas jagung
j. Jumlah produksi daging ternak besar
k. jumlah produksi daging ternak kecil
l. jumlah produksi ternak unggas
m. jumlah produksi telur
n. Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama

4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
   a. Faktor penyebab tidak tercapainya target, karena capaian kinerja yang disajikan adalah capaian kinerja TW I sementara kinerja di hitung per tahun.
   b. Faktor penyebab terpenuhinya target atau melebihi karena adanya perubahan target trend masyarakat dalam berbudidaya (yang dipicu oleh fluktuasi harga komoditas)
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:
   a. Capaian kinerja yang sampai akhir 2026 kemungkinan tidak tercapai yaitu
      - Indeks ketahanan pangan, Prevalesni ketidakcukupan pangan, merupakan indikator kinerja yang faktor perhitungannya lintas OPD sehingga untuk mencapai target harus dengan meningkatkan koordinasi senhingga program/kegiatan yang dilaksankan terintegrasi dan berkelanjutan (karena permasalah tidak bisa diselsaikan hanya dalam waktu 1 tahun)
      - Persentase ketersediaan alat mesin sarana pangan utama karena indikator yang berbasis anggaran (sementara bantuan APBN 2027 minim).
   b. Indikator kinerja yang lain diakhir tahun 2026 mungkin dapat tercapai apabila tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim sehingga tidak berpengaruh pada produksi dan peningkatan jenis penyakit hewan, serta berkembanganya serangan OPT.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ***Baik*** yaitu dengan nilai **99,26%.** Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Efisensi (%)	Ket
1.	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulan dan kemandirian panngan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	0	98.63	98,63	Disupport kegiatan APBN, APBD I
2.	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,89	100	18,11	Disupport kegiatan APBN
3.	Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	95,95	100	4,05	Disupport kegiatan APBN, APBD I
4.	Meningkatnya pengawasan mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	97,24	93.10	-4,14	Disupport kegiatan APBN
5.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	0	100	100	Disupport kegiatan APBN
6.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya	99,84	100	0.16	Disupport kegiatan APBN
7.	Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	0	100	100	Disupport kegiatan APBN
8.	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi pengolahan ikan	98,66	100	1,34	Disupport kegiatan APBN
9.	Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	1. Produktivitas Padi 2. Produktivitas jagung 3. Produktivitas bawang putih 4. Produktivitas bawang merah 5. Produktivitas cabai rawit 6. Produktivitas cabai keriting 7. Produktivitas tembakau	97,47	98,04	0,57	Disupport kegiatan APBN, APBD I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Efisensi (%)	Ket
		8. Produktivitas kopi robusta 9. Produktivitas kopi arabika 10. Jumlah produksi daging ternak besar 11. jumlah produksi daging ternak kecil 12. jumlah produksi ternak unggas 13. jumlah produksi telur 14. Persentase kelahiran pedet				
10.	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	99,31	100	0,69	Disupport kegiatan APBN, APBD I
11.	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	99,43	100	0,57	Disupport kegiatan APBN, APBD I
12.	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	0	100	100	Disupport kegiatan APBN
13.	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi Persentase kenaikan kelas kelompok tani	90,21	100	8,79	
14.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		95,73	100	4,27	
	Rata-rata		96,22	99,26		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kunci. Adapun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 -2.5 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renja PD 2025	Target Renja PD 2026	Target Renja PD 2027	Realisasi Renja PD 2025	Realisasi Renja PD 2026	Capaian s.d tw 1 2026
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)									
	1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	79,27	79,63	79,9	68,50	68,50	86,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)									
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		85,35	85,7	86	86,63	86,63	100,00
	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah		74,8	74,85	74,9	74,80	74,80	99,93
		Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
		Pangan							
	3	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan *(of Undernourishment)*	%	9,7	9,29	8,88	11,23	11,23	84.23
		Kelautan dan Perikanan							
	1	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22,25	22,3	22,41	22,27	22,27	99,87
		Urusan Pemerintahan Pilihan							
		Pertanian							
	1	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,4	22,35	22,3	23,01	23,01	100,00
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan									
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	%	100	100	100	98,63	77,7	77,71
Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat									
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	89,73	90,03	90,33	89,87	89,87	99,82
Program Penanganan Kerawanan Pangan									
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat	3	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100	100	100,00	100,00	100,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan									
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	4	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	%	100	100	100	93,10	88,71	88,71

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renja PD 2025	Target Renja PD 2026	Target Renja PD 2027	Realisasi Renja PD 2025	Realisasi Renja PD 2026	Capaian s.d tw 1 2026
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap									
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	1	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	140,15	140,2	140,5	140,18	84,8	60,48
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya									
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	2	jumlah produksi perikanan budidaya	ton	10.670,94	10.672,01	10.673,61	10.671,40	6.771,330	63,45
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan									
Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	3	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	%	10	10	10	28,57	24,49	100,00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan									
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	4	Jumlah produksi pengolahan ikan	ton	395,752	395,752	395,76	395,752	191,6	48,41
INDIKATOR PROGRAM									
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian									
Meningkatnya produksi. dan kualitas hasil pertanian	1	Produktivitas Padi	ton/ha	6,15	6,16	6,17	6,09	6,03	97,89
	2	Produktivitas jagung	ton/ha	5,5	5,55	5,6	5,05	5,26	94,77
	3	Produktivitas bawang putih	ton/ha	6,05	6,15	6,16	7,16	8,08	100,00
	4	Produktivitas bawang merah	ton/ha	6,8	7,1	7,11	8,14	8,58	100,00
	5	Produktivitas cabai rawit	ton/ha	7	7,01	7,02	7,38	7,32	100,00
	6	Produktivitas cabai keriting	ton/ha	7	7,01	7,02	7,56	7,42	100,00
	7	Produktivitas tembakau	ton/ha	0,640	0,643	0,645	0,672	0,672	100,00
	8	Produktivitas kopi robusta	ton/ha	0,702	0,7025	0,703	0,73	0,73	100,00
	9	Produktivitas kopi arabika	ton/ha	0,4	0,410	0,415	0,56	0,56	100,00
	10	Jumlah produksi daging ternak besar	kg	806130	807654,000	809.172	1.160.527,20	210.263,00	26,03
	11	jumlah produksi daging ternak kecil	kg	267.584	268.110	268.637	417.341,82	437.740	100,00
	12	jumlah produksi ternak unggas	kg	6.230.875	6.243.337	6.255.823	6537554,12	4.698.242	75,25
	13	jumlah produksi telur	kg	6.860.985	6.867.846	6.874.713	8.888.810,54	5.619.866	81,83
	14	Persentase kelahiran pedet	%	48	48	48	64,15	52,54	100,00
	15	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	36,1	37,13	38,17	28,86	28,86	77,72
Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	16	Persentase Prasarana yang digunakan	%	100	100	100	100	100	100,00

Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renja PD	Target Renja PD	Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Realisasi Renja PD	Capaian s.d tw 1
				2025	2026	2027	2025	2026	2026
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	17	Persentase penanganan penyakit hewan	%	85	86	87	99,44	96,42	100,00
	18	Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	75	76	77	79,75	77,76	100,00
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	19	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	75	78	81	94,32	98,9	100,00
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	20	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	58	58	58	61,88	61,88	100,00
	21	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	1,3	1,3	1,3	1,40	1,40	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananKabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA		CAPAIAN s/d TW I 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	9.7	15.93	25.16	26,89	na	Capaian belum bisa dihitung karena perhitungannya tahunan	
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	%	60	65	70	100	na	Capaian belum bisa dihitung karena perhitungannya tahunan	
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA		CAPAIAN s/d TW I 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	8	8	8	8	na	Capaian belum bisa dihitung karena perhitungannya tahunan	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	60	60	60	60	na	Capaian belum bisa dihitung karena perhitungannya tahunan	
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6.15	6.16	6.17	6,09	na	Capaian belum bisa dihitung karena perhitungannya tahunan	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, 2026

Indikator kinerja kunci tiap tahun berbeda menyesuaikan dengan pedoman LPPD dari Kementerian dalam negeri sehingga data yang ditampilkan adalah data sesuai Renstra OPD.

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

1. Indeks Ketahanan Pangan

   Indeks Ketahanan Pangan adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan suatu wilayah dalam menjamin pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk, baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan sepanjang waktu. IKP disusun berdasarkan kerangka 3 pilar ketahanan pangan FAO dengan skala 1-100:

   1. Ketersediaan Pangan : Kemampuan memproduksi, mengimpor, dan mencadangkan pangan
   2. Akses Pangan : Kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan secara fisik dan ekonomi
   3. Pemanfaatan Pangan : Kemampuan memanfaatkan pangan secara layak, aman, dan bergizi

      Metode Perhitungan & Kategori

      Kategori IKP

Skor IKP	Kategori	Makna
81 - 100	Sangat Tahan	Sistem pangan sangat stabil, risiko kerawanan rendah
61 - 80	Tahan	Sistem pangan mampu memenuhi kebutuhan, perlu penguatan
41 - 60	Cukup Tahan	Sistem pangan rentan terhadap guncangan
0 - 40	Rentan	Sistem pangan rawan, perlu intervensi segera

Tabel 2.4 Capaian kinerja IKP
Kabupaten Temanggung, Tahun 2021-2026 Triwulan II

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (TW II)
IKP				69.27	68.50	

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Triwulan II

Pada tahun 2025 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung tercatat sebesar 68,50 atau turun 0,77 poin dari tahun 2024 sebesar 69,27, namun masih berada pada kategori “Tahan”. Penurunan ini menjadi sinyal awal adanya kerentanan pada sistem pangan daerah. Penurunan IKP dipengaruhi oleh 3 indikator prioritas yaitu NPCR, Protein Hewani, dan Cadangan Pangan yang masih berada pada zona

merah. Di sisi lain terjadi capaian positif dimana Skor PPH meningkat dari 89,43 menjadi 89,87 Artinya kualitas konsumsi masyarakat semakin beragam dan mendekati pola gizi seimbang ideal dan angka PoU menurun dari 11,72% menjadi 11,23% Artinya jumlah penduduk dengan asupan energi kurang sudah berkurang sekitar 0,49 poin. Hal ini menunjukkan kualitas dan kuantitas konsumsi masyarakat membaik, namun fondasi sistem ketahanan pangan perlu segera diperkuat. Oleh karena itu strategi ke depan difokuskan pada stabilisasi harga pangan, peningkatan konsumsi protein hewani melalui budidaya lokal, dan penguatan cadangan pangan desa agar ketahanan pangan Temanggung tidak hanya cukup, tetapi juga bergizi dan berkelanjutan.

Diagnosa Penyebab Penurunan IKP berdasarkan hasil analisis 2025, terdapat 3 indikator penyusun IKP yang masuk kategori prioritas/merah, yaitu:

1. NPCR / *Normalized Price Change Rate* : Menunjukkan volatilitas harga pangan masih tinggi. Fluktuasi harga beras, cabai, dan telur akibat biaya logistik dataran tinggi serta ketergantungan pada komoditas utama menyebabkan daya beli masyarakat tertekan. Hal ini langsung menggerus dimensi Akses.
2. Prioritas Protein Hewani : Konsumsi telur, ikan, daging, dan susu masih rendah. Padahal kelompok pangan hewani memiliki bobot besar dalam skor PPH. Kondisi ini menghambat skor PPH untuk menembus 90 dan menjadi salah satu penyebab dimensi Pemanfaatan belum optimal. Dampak jangka panjangnya adalah risiko stunting dan “kelaparan tersembunyi”.
3. Prioritas Cadangan Pangan : Kapasitas lumbung pangan desa dan cadangan pangan pemerintah masih rendah. Budaya "panen langsung jual" serta belum optimalnya pengelolaan cadangan membuat dimensi Ketersediaan dan Stabilitas menjadi rapuh terhadap guncangan seperti gagal panen dan bencana.

Adapun faktor pendorong nya adalah

1. Keanekaragaman produksi dataran tinggi: Sentra sayur, salak pondoh, kopi, dan padi menopang ketersediaan dan skor PPH.
2. Kelembagaan sosial kuat: Peran PKK, Gapoktan, dan koperasi tani efektif dalam penyaluran bantuan sehingga PoU dapat ditekan.
3. Kearifan lokal: Tradisi Wiwit Mbako dan budaya gotong royong menjadi jaring pengaman sosial saat terjadi guncangan.

Untuk mengembalikan tren IKP dan mempertahankan capaian PPH serta PoU, diperlukan 3 strategi utama sesuai indikator merah:

1. Stabilisasi Harga - Menjawab NPCR Merah Perlu penguatan Toko Tani Indonesia dan operasi pasar melalui BUMDes. Diversifikasi pola tanam dari monokultur tembakau ke tumpang sari jagung, kedelai, dan sayur untuk meredam risiko gagal panen satu komoditas.
2. Peningkatan Konsumsi Protein Hewani - Menjawab Prioritas Protein Hewani. Edukasi gizi seimbang melalui posyandu dan tokoh agama agar pola konsumsi masyarakat semakin beragam.
3. Penguatan Cadangan Pangan - Menjawab Prioritas Cadangan Pangan

   Revitalisasi lumbung pangan desa dengan target stok minimal 3 bulan. Pemberian insentif dana desa bagi desa yang lumbungnya aktif. Pembangunan cold storage mini di sentra sayur untuk menekan susut pascapanen

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. PoU (*Prevalence of Undernourishment*)

Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk dalam suatu wilayah yang mengalami kekurangan asupan energi pangan (kalori) secara kronis, yaitu kondisi ketika asupan energi pangan rata-rata masyarakat berada di bawah kebutuhan energi minimum untuk hidup sehat dan aktif. Nilai PoU digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan dan gizi masyarakat serta menjadi salah satu indikator dalam pemantauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya target “Tanpa Kelaparan” (*Zero Hunger*). Semakin rendah angka PoU, semakin baik kondisi ketahanan pangan suatu wilayah karena menunjukkan semakin sedikit penduduk yang mengalami kekurangan energi kronis.

Indikator PoU digunakan secara resmi oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*) dalam memantau ketahanan pangan suatu negara atau daerah dan menjadi salah satu ukuran utama untuk menilai kemajuan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 2: Tanpa Kelaparan). PoU memperhitungkan:

1. Ketersediaan energi pangan rata-rata per kapita
2. Distribusi konsumsi energi di antara penduduk (ketimpangan konsumsi)

3. Kebutuhan energi minimum (*Minimum Dietary Energy Requirement*/MDER)

Rumus *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dikembangkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai metode resmi untuk mengukur proporsi penduduk yang mengalami kekurangan gizi kronis. Metode ini didasarkan pada pendekatan distribusi log-normal dari konsumsi energi pangan per kapita, dengan mempertimbangkan rata-rata ketersediaan energi pangan, tingkat ketimpangan konsumsi energi antarpenduduk, serta kebutuhan energi minimum (*Minimum Dietary Energy Requirement*/MDER).

Secara matematis, PoU dihitung sebagai peluang (*probability*) bahwa konsumsi energi seseorang berada di bawah kebutuhan energi minimum. Perhitungan *Prevalence Of Undernourishment* (PoU) Dilakukan Satu Kali Dalam Satu Tahun Berdasarkan Data Ketersediaan Energi Pangan, Distribusi Konsumsi Energi Masyarakat, Dan Kebutuhan Energi Minimum. Nilai Pou Disusun Bersamaan Dengan Laporan Tahunan Ketahanan Pangan Yang Mengacu Pada Data Dari FAO, Badan Pangan Nasional, Dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan hasil penghitungan, perkembangan PoU Kabupaten Temanggung selama periode 2021 hingga Tahun 2026 TW II menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung membaik (semakin kecil angka PoU semakin bagus), sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Skor *Prevalence of Undernourishment* (PoU)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2021-2026 Triwulan II

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (TW II)
Prevalence of Undernourishment (PoU)	18,48	14,39	10,26	11,72	11,23	11,23

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Realisasi PoU Kabupaten Temanggung tahun 2025 sebesar 11,23%. Dibanding target RPJMD 2025 sebesar 9,70%, terdapat selisih sebesar 1,53 poin. Artinya target belum tercapai. Namun jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 11,72%, terjadi penurunan sebesar 0,49 poin. Ini menunjukkan adanya perbaikan meskipun belum sesuai target. Untuk tahun 2026 TW II, data realisasi masih menggunakan data 2025 sebesar 11,23% karena menunggu rilis data

dari BPS. Dengan target 2026 sebesar 9,29%, maka masih terdapat gap sebesar 1,94 poin yang harus dikejar. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam akses, ketersediaan, dan konsumsi pangan masyarakat.

Pada tahun 2021 angka POU sebesar 18,48%, akibat dari pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat. Memasuki tahun 2022, nilai PoU menurun (mengalami perbaikan) signifikan menjadi 14,39%, seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya ketersediaan pangan hasil panen lokal. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 10,26%, sebagai hasil dari berbagai intervensi pangan dan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah daerah. Pada tahun 2024, PoU sedikit meningkat menjadi 11,72%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pokok dan faktor iklim terhadap produksi pertanian. Tahun 2025 menjadi 11,23% kemungkinan dipengaruhi oleh kegiatan penyaluran bantuan pangan (Cadangan beras pemerintah) kepada Masyarakat sebanyak 69.864 penerima. Dan Tahun 2026 direncanakan penerima bantuan pangan sebanyak 107.255 Jiwa (dasar penerima BLTS Kesra, desil I-IV).

Dalam Upaya Penurunan angka PoU Kabupaten Temanggung Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) melaksanakan berbagai program dan intervensi yang berfokus pada peningkatan akses serta ketersediaan pangan bagi masyarakat. Beberapa upaya strategis yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Gerakan Pangan Murah (GPM)

   Kegiatan GPM dilaksanakan secara rutin di berbagai wilayah Kabupaten Temanggung sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok tahun 2025 dilakukan sebanyak 48 kali GPM. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan dan periode kenaikan harga pangan. Upaya ini terbukti efektif dalam memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan menekan potensi kerawanan pangan. Tahun 2026 TW II sudah dilaksanakan GPM sebanyak 23 kali dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

b. Subsidi Pangan di Beberapa Desa Prioritas

Sebagai bentuk intervensi langsung terhadap kelompok rentan, pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi melaksanakan program subsidi pangan berupa beras dan minyak goreng di beberapa desa di Kecamatan Temanggung. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan keterjangkauan pangan masyarakat khususnya di daerah bukan sentra produksi pangan. Pada Triwulan I Candiroto dan Wonoboyo Program ini didanai dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok serta menjaga ketahanan pangan rumah tangga. Komoditas yang di subsidi Beras medium, bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras.

c. Penyaluran Bantuan Pangan

Selama periode TW II Tahun 2026, telah disalurkan bantuan pangan kepada 107.255 penerima manfaat di 20 Kecamatan, masing-masing menerima 10 kilogram beras per bulan (total beras tersalurkan bulan Februari 1.072.550 kg dan bulan Maret 1.072.550 kg) serta minyak goreng untuk 107.255 penerima manfaat di 20 Kecamatan masing- masing penerima mendapatkan 2 liter/bulan. Bantuan ini bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, sehingga secara langsung dapat menekan angka kekurangan konsumsi energi masyarakat.

d. Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Sebagai upaya tambahan dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat rentan, DKPPP juga menyalurkan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 160 kg di untuk bantuan dampak bencana di Kec. Gemawang dan Kec. Tembarak. Program ini menjadi bentuk tanggap cepat dalam mengantisipasi kondisi darurat pangan di tingkat desa karena dampak bencana.

2. Angka Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan atau disingkat dengan AKI merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang/masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar dengan satuan kg/kapita/tahun. Angka konsumsi ikan yang didapatkan dari konsumsi ikan dalam rumah tangga + konsumsi ikan luar rumah tangga + konsumsi ikan tidak tercatat. AKI merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara teknis dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perikanan. Manfaat dari perhitungan AKI adalah untuk:

a. Menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah
b. Mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di suatu daerah
c. Mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani.

Tabel 2.6.
Capaian Angka Konsumsi Ikan Tahun 2021- 2026 TW II

No.	Indikator	Satuan	TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kap/thn	21,22	21,78	21,88	22,25	22,27	22,27

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa capaian angka konsumsi ikan fluktuatif. Tahun 2026 triwulan II sebesar 22,27 kg/kap/thn (masih menggunakan data 2025 karena data susesnas belum rilis). Sumber data yang digunakan dalam perhitungan Angka Konsumsi Ikan adalah Data Susenas BPS.

Konsumsi dan pola makan dipengaruhi olah banyak faktor, tidak hanya ekonomi tapi juga budaya, ketersediaan, pendidikan, gaya hidup dan sebagainya. Dengan memperhatikan beragam faktor tersebut dapat memperjelas alasan tingkat konsumsi pangan termasuk konsumsi ikan di suatu daerah dapat berbeda secara signifikan. Perhitungan AKI dengan menggunakan data Susenas adalah tepat karena diperoleh angka konsumsi ikan secara nyata, namun data Susenas masih memiliki beberapa kelemahan, sehingga untuk mendapatkan angka yang akurat mendekati kebenaran, masih diperlukan angka koreksi. Angka koreksi yang digunakan adalah angka koreksi untuk konsumsi di luar rumah tangga (B) dan konsumsi tidak tercatat (C). Pada saat ini penetapan besarnya angka koreksi dilakukan dengan *expert adjustment* (pendapat pakar) yang berkompeten.

Berdasarkan hasil pemantauan data konsumsi perikanan, Angka Konsumsi Ikan pada tahun 2024 tercatat sebesar 22,25 kg/kapita/tahun.

Untuk tahun 2026, nilai sementara atau proyeksi juga menunjukkan angka 22,27 kg/kapita/tahun. Peningkatan nilai AKI dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain semakin meningkatnya konsumsi ikan di dalam rumah tangga yang ditandai dengan naiknya nilai KIDRT atau

nilai A hasil Susenas tahun 2025. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan pangan bergizi (protein hewani berupa ikan) dan adanya target pemerintah untuk pengentasan stunting secara nasional yang menjadi fokus daerah.

Hal lain yang berpengaruh adalah semakin banyaknya gerai makanan dan minuman seperti rumah makan, café dan *coffee shop* yang tersedia di kabupaten temanggung sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah konsumsi makan ikan diluar rumah tangga. Aktivitas kunjungan tamu hotel di kabupaten Temanggung serta banyaknya olahan makanan berbahan dasar surimi (daging ikan yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta), seperti bakso ikan, otak-otak, nugget ikan, pempek dan lain-lain yang mulai banyak diminati oleh masyarakat.

Beberapa faktor penghambat yang menyebabkan angka konsumsi ikan di kabupaten Temanggung masih rendah adalah sebagai berikut:

1. Gaya hidup dan budaya masyarakat yang belum terbiasa mengkonsumsi ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani harian
2. Sebagian besar masyarakat lebih suka mengkonsumsi protein hewani dari hasil peternakan seperti ayam, telur, daging sapi dan protein nabati seperti tahu dan tempe.
3. Bagi sebagian orang berpendapat bahwa mengkonsumsi ikan merupakan hal yang ribet dan membutuhkan waktu lama untuk mengolahnya menjadi makanan siap santap
4. Ikan merupakan bahan pangan berprotein tinggi, sehingga memerlukan penanganan dan cara penyimpanan yang tepat (harus segera dibersihkan dan disimpan pada suhu rendah) supaya tidak mudah busuk.
5. Tingkat ekonomi masyarakat yang belum stabil untuk mengkonsumsi ikan setiap hari
6. Harga ikan yang mahal dapat menjadi hambatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan konsumsi ikan.
7. Kurangnya pengetahuan tentang manfaat kesehatan dan gizi ikan dapat mengurangi minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.
8. Keterampilan pengolahan ikan yang kurang dapat membatasi variasi konsumsi ikan.

9. Ketersediaan ikan yang tidak stabil dapat mempengaruhi konsumsi ikan.
10. Preferensi makanan yang tidak menyukai ikan dapat menjadi hambatan bagi peningkatan konsumsi ikan.
11. Kualitas produk ikan yang buruk dapat mengurangi minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan angka konsumsi ikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ikan merupakan sumber protein yang memiliki kandungan gizi yang tinggi sehingga baik untuk dikonsumsi terutama untuk anak, ibu hamil dan ibu menyusui
2. Melakukan sosialisasi gemar memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) dan memperkenalkan produk olahan ikan kepada masyarakat
3. Menghimbau kepada para pelaku usaha perikanan terutama pengolah ikan agar melakukan diversifikasi ikan menjadi produk olahan pangan berbasis ikan seperti otak-otak, ikan duri lunak (Bandeng presto), pindang ikan, pepes, pempek, bakso, abon dan lain sebagainya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk dan masyarakat bisa mendapatkan produk ikan dalam bentuk lain dan lebih mudah untuk mengkonsumsinya

Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan di Kabupaten Temanggung antara lain dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Kegiatan Sosialisasi Gemarikan merupakan program kegiatan Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar menjadikan ikan sebagai bagian utama dari pola makan sehari-hari dan membantu program pemerintah untuk mencegah stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang menyebabkan anak memiliki postur tubuh pendek atau jauh dari rata-rata anak lain di usianya. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya. Kasus stunting di Kabupaten Temanggung masih menjadi isu serius dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah berupaya menekan angka kasus stuntuing dengan pencegahan sedini mungkin, salah satunya dengan kegiatan Sosialisasi Gemarikan.

Kegiatan Sosialisasi Gemarikan di Kabupaten Temanggung bersumber dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan Sosialisasi Gemarikan dilaksanakan pada lokasi prioritas penanggulangan stunting atau wilayah di kabupaten Temanggung yang masih memiliki angka prevalensi stunting relatif tinggi. Pada kegiatan sosialisasi dilakukan penyampaian materi oleh narasumber terkait pentingnya konsumsi ikan untuk mendukung penurunan stunting dan penyerahan paket gemarikan yang berisi produk olahan ikan. Target penerima paket Gemarikan adalah anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui yang merupakan kelompok rentan dan membutuhkan asupan protein yang tinggi. Kegiatan Gemarikan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Daftar Kegiatan Gemarikan dan Paket Bantuan Gemarikan Tahun 2025

No.	Tanggal	Lokasi	Jumlah	Sasaran	Sumber Dana
1	9 Juli 2025	Balai Desa Kalirejo, Kec. Kledung	100 Paket	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	APBD Provinsi Jawa Tengah
2	15 Oktober 2025	Balai Desa Nglondong, Kec. Parakan	500 Paket	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	APBN - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP
3	27 November 2025	Balai Desa Danurejo, Kec. Kedu	500 Paket	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	APBN – Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta - KKP
4	15 Desember 2025	Balai Desa Baledu, Kec. Kandangan	500 Paket	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	APBN - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP
5	15 Desember 2025	Balai Desa Gondang Wayang, Kec. Kedu	500 Paket	Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui	APBN - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP
6	20 Mei 2026	Desa Legoksari Kec. Tlogomulyo	100 Paket	Balita, Ibu Hamil	APBD provinsi Jawa Tengah

3. Rasio PDRB Sektor Pertanian

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator makro ekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian menurut lapangan usaha selama satu periode tertentu (tahunan/triwulan).

Realisasi Rasio sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Temanggung pada Tahun 2026 mencapai 23, 01% (masih menggunakan data 2025) menempati urutan kedua dalam menyumbang PDRB kabupaten, hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor yang berpengaruh dalam struktur perekonomian daerah. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertanian masih memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Hal ini dipengaruhi kondisi geografis Temanggung yang berada di wilayah dataran tinggi dengan kesuburan tanah yang baik sehingga mendukung pengembangan berbagai komoditas pertanian. Selain itu, keberadaan komoditas unggulan seperti tembakau, kopi, serta berbagai komoditas hortikultura dataran tinggi memberikan nilai ekonomi yang signifikan dalam struktur perekonomian daerah.

Di sisi lain, sektor pertanian juga memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat pedesaan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat masih sangat bergantung pada sektor ini. Dukungan program pembangunan pertanian dari pemerintah daerah maupun pusat, seperti peningkatan produksi, penyediaan sarana prasarana pertanian, serta penguatan kawasan komoditas unggulan, turut mendorong keberlanjutan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Namun demikian, meskipun kontribusinya masih cukup besar, secara struktur ekonomi pada rentang tahun 2021-2025 menunjukkan kontribusi yang fluktuatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan terbesar terjadi pada Tahun 2024 yang disebabkan penurunan produksi karena dampak dari fenomena El Nino (kurangnya ketersediaan air). Capaian indikator Rasio PDRB Sektor Pertanian Tahun 2026 menggunakan data 2025 karena data tahun 2026 belum rilis.

Tabel 2.8.
Capaian Rasio PDRB Sektor Pertanian Tahun 2026 TW II

No.	Indikator	Satuan	TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	**Rasio PDRB Sektor Pertanian**	**%**	23,91	23,42	22,90	22,33	23,01	23,01

Jika dilihat dari tabel bahwa terjadi peningkatan di Tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan adanya alokasi anggaran untuk perbaikan irigasi yang berpengaruh pada indeks pertanaman dan kenaikan produksi (produktivitas pertanian dan ketahanan pangan) juga bantuan alat mesin pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam budidaya. Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja adalah

1. Menurunnya luas panen (berkurangnya luas lahan produktif) yang berpengaruh pada berkurangnya kapasitas produksi pertanian dalam jangka panjang,
2. Ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi iklim dan cuaca (perubahan pola musim, curah hujan yang tidak menentu, serta potensi terjadinya bencana alam dapat mempengaruhi produktivitas dan stabilitas produksi komoditas pertanian,
3. Rendahnya nilai tambah produk pertanian (sebagian besar hasil pertanian masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai ekonomi yang diperoleh relatif terbatas. Minimnya pengolahan hasil pertanian dan penguatan rantai pasok menyebabkan potensi ekonomi dari komoditas unggulan daerah belum sepenuhnya optimal),
4. Struktur tenaga kerja pertanian yang didominasi oleh petani berusia lanjut serta masih terbatasnya adopsi teknologi pertanian modern juga menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas. Kondisi ini dapat mempengaruhi efisiensi usaha tani dan kemampuan sektor pertanian untuk berkembang secara berkelanjutan.

Upaya pencapaian target mempertahankan produksi melalui penerapan GAP, GHP dan penguatan inovasi dan teknologi pertanian, pengembangan hilirisasi produk, serta perlindungan lahan pertanian agar sektor pertanian tetap mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap perekonomian daerah.

C. INDIKATOR PROGRAM

1.1 URUSAN PANGAN

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat, indikator Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemah, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor pola pangan harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk atau ketersediaan pangan, baik jumlah maupun komposisi/keragaman pangan menurut jenis pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahunun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsipangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Rumus untuk memperoleh Skor Pola Pangan Harapan 2026 didapat dari Perhitungan menggunakan data dasar hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2026. Skor PPH ideal adalah 100 yang menunjukkan keberagaman tingkat konsumsi pangan di suatu wilayah (semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Tujuan utama penyusunan Pola Pangan Harapan adalah untuk membuat suatu nasionalisasi pola konsumsi yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai citarasa (FAO-RAPA, 1989). Perhitungan Skor PPH dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Realisasi Skor PPH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2026 TW II masih menggunakan data Tahun 2025 karena angka susenas belum rilis. Capaian realisasi Skor PPH Tahun 2021 s.d 2026 triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9.
Realisasi Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2021-2026 Triwulan II

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Skor Pola Pangan Harapan	79.7	80,10	93,5	89,43	89,87	89,87

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Triwulan II

Berdasarkan tabel di atas, skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021-2023 cenderung meningkat sampai tahun 2023 dan menurun di Tahun 2024 dengan capaian sebesar 89,43 turun sebesar 4,07 point, dan tahun 2025 naik menjadi 89.87. Capaian skor pola pangan harapan Kab Temanggung dibawah capaian Provinsi Tahun 2025 sebesar 96,9 dan capaian Skor PPH nasional Tahun 2025 sebesar 95,1. Realisasi Tahun 2026 masih menggunakan realisasi Tahun 2026 karena data susenas belum rilis.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja rasio skor Pola Pangan Harapan, beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, yaitu:

1. Promosi Pola Konsumsi Pangan B2SA

   Promosi konsumsi pangan B2SA merupakan suatu program yang dirancang sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas mengenai pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), dengan harapan terbentuk pola konsumsi masyarakat yang sehat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, aktif dan produktif. Kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan diantaranya adalah : B2SA Goes to School (BGTS) dan pesantren serta pelaku usaha catering, Pemasangan Iklan B2SA, Promosi melalui media sosial, kegiatan pelatihan pembuatan menu B2SA untuk keluarga dengan melibatkan TP PKK Kecamatan dan sekolah, serta metode KIE yang lain. Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta protein hewani masih perlu mendapatkan dukungan dari lintas sektor terkait, karena preferensi dan tingkat konsumsi buah dan sayur serta protein hewani terkait erat dengan faktor- faktor lain, diantaranya edukasi, gaya hidup dan pola makan (food habit), tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Konsumsi sayur dan buah masyarakat serta protein hewani berkaitan erat juga dengan distribusi sayur dan buah juga sumber protein hewani antara wilayah sentra produksi dan di luar sentra produksi yang berpengaruh terhadap harga komoditas

tersebut. Masyarakat akan lebih memprioritaskan kebutuhan karbohidrat terlebih dahulu sebagai sumber energi (beras) ketimbang buah dan sayuran serta sumber protein hewani sebagai sumber vitamin dan mineral.

2. Pengembangan Desa B2SA

   DKPPP mendukung upaya penanganan masalah gizi di Indonesia melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di 1 kelompok yaitu KWT Ngudi Lestari Desa Candisari, Bansari yang bertujuan mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA sehari – hari guna mewujudkan sumber daya manusia yang aktif, sehat, dan produktif. Kegiatan Sosialisasi Edukasi Pola Konsumsi B2SA kerjasama dengN Dinas ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan TP – PKK, Sekolah, Tokoh masyarakat, kader posyandu, SPPG, PPJI, Karang taruna dan remaja putri sebagai wujud kolaborasi dan sinergi kegiatan. Tujuan yang dirasakan setelah kegiatan ini dilaksanakan adalah masyarakat semakin memahami konsumsi pangan B2SA sehingga dapat menerapkan konsumsi sehari-hari di rumah tangga.

3. Meningkatkan ketersediaan pangan sampai tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, berupa bantuan kegiatan pekarangan pangan bergizi (P2B) dari APBN untuk 5 kelompok wanita tani, yaitu KWT Ngudi Lestari Ds Wonokerso Pringsurat, KWT Mekar Tani Ds. Tlogorejo Kec. Temanggung, KWT. Mutiara Mulya II Ds. Kandangan Kec Kandangan, KWT Sejahtera Ds. Tuksari Kec. Kledung, KWT karya Sejahtera Ds. Kledung Kec. Kledung.
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang digalakkan oleh Dinas Kesehatan.
5. Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan), sebanyak 100 paket dengan fokus ke Daerah Lokus Stunting dan sasaran lokasi peningkatan konsumsi ikan (Ibu Hamil, Balita), Desa Legoksari Kec. Tlogomulyo
6. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk stabilisasi ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung.

2. **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, indikator Persentase Ketersediaan Pangan Pokok**

Persentase ketersediaan pangan dihitung dari produksi bersih beras, jumlah cadangan pangan pemerintah, serta jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 2.10.
Realisasi Persentase Ketersediaan Pangan Pokok
Tahun 2026 Triwulan II

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	147,06	122,54	133,42	90,2	98,63	77,7

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase ketersediaan pangan pokok Tahun 2026 triwulan II sebesar 77.7% yang dihitung dari total produksi padi pada TW II ditambah Cadangan pangan pemerintah dibagi kebutuhan konsumsi harian masyarakat Temanggung selama TW II.

Dalam mencapai target indikator tersebut beberapa langkah strategis yang sudah di lakukan antara lain:

1. Koordinasi lintas OPD terkait dengan peningkatan produksi dengan perbaikan infrastruktur irigasi serta penambahan areal tanam (PAT) guna peningkatan (minimal mempertahankan) produksi tanaman pangan.
2. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat sejalan dengan perbaikan pengelolaannya untuk menjamin ketersediaan dan kualitas bahan pangan sesuai standart.
3. Peningkatan indeks pertanaman padi serta penggunaan benih padi unggul berlabel.
4. Peningkatan kerjasama dengan daerah surplus komoditas beras dalam bentuk perdagangan/meningkatnya akses distribusi serta keterjangkauan pangan.
5. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen.
6. Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat.

Faktor penghambat pencapaian target diantaranya:

a. Faktor produksi : karena perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman, terbatasnya lahan produktif, penerapan GAP dan GHP belum sesuai standart
b. Faktor distribusi : gangguan rantai pasok, ketinpangan distibusi antar wiayah (daerah surplus dan defisit)
c. Faktor ekonomi : harga pangan tidak stabil (inflasi pangan), daya beli masyarakat rendah
d. Faktor sosial dan konsumsi pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat.

Faktor pendorong tercapainya indikator Persentase Ketersediaan Pangan Pokok:

a. Peningkatan Produksi Pertanian : penggunaan benih unggul dan teknologi pertanian modern, penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara efektif.
b. Peningkatan Produksi Pertanian: penggunaan benih unggul dan teknologi pertanian modern, penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, pengendalian hama dan penyakit tanaman secara efektif.
c. Stabilitas Harga dan Akses Ekonomi : Kebijakan stabilisasi harga pangan, Peningkatan daya beli masyarakat, Program bantuan pangan atau subsidi untuk kelompok rentan
d. Kebijakan dan Tata Kelola yang Efektif : Penguatan cadangan pangan pemerintah
e. Diversifikasi Pangan : Pengembangan konsumsi pangan lokal non-beras, Edukasi masyarakat tentang pola makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, indikator Persentase penanganan kerawanan pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi atas ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkalanjutan.

Tabel 2.11.
Capaian Persentase Penanganan Kerawanan Pangan
Tahun 2026 Triwulan II

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	na	na	na	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 2026 triwulan II Persentase Penanganan Kerawanan Pangan tercapai 100%. Sesuai dengan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) Tahun 2025 di Kabupaten Temanggung, yang terindikasi daerah rentan rawan pangan prioritas 2 dan 3 ada 17 desa. Upaya penanganan kerawanan pangan melalui kegiatan stabilisasi pangan dan harga pangan meliputi 20 Kecamatan dengan Gerakan Pangan Murah yang bertujuan memudahkan akses masyarakat terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan serta kegiatan pemberian bantuan pangan pemerintah dengan jumlah penerima sebanyak 107.255 jiwa dibulan Februari dan Maret di 20 kecamatan (berupa beras 10 kg/bulan dan minyak goreng 2 liter/bulan).

Faktor ekonomi masyarakat berpengaruh pada tingkat kerawanan pangan. Tingkat kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan sebagian rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi. Kenaikan harga bahan pangan pokok yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat juga memperburuk kemampuan akses pangan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Dari aspek distribusi, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah turut berperan dalam meningkatkan risiko kerawanan pangan. Daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau memiliki jaringan distribusi yang kurang memadai cenderung mengalami keterlambatan pasokan pangan dan harga pangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Selain faktor tersebut, bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor juga dapat mengganggu sistem produksi maupun distribusi pangan**.**

Faktor Pendorong indikator ini adalah

1. Perluasan akses informasi kerawanan pangan,
2. Pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial ekonomi politik dan keamanan,

3. Pengentasan kemiskinan,
4. Program bansos dr pemerintah,
5. Peningkatan aksesibilitas pangan

Faktor penghambat indikator ini adalah

1. Penurunan produksi tanaman pangan karena dampak perubahan iklim dan serangan hama,
2. Peningkatan jumlah penduduk,
3. Kemiskinan dan daya beli masyarakat rendah,
4. Kenaikan harga pangan,
5. Keterbatasan diversifikasi pangan.

Upaya tindak lanjut:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan: Meningkatkan ketersediaan pangan yang bergizi dan terjangkau bagi masyarakat.
2. Bantuan Sosial Pangan: Memfasilitasi bantuan sosial pangan yang berbasis gizi yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
3. Kebijakan Distribusi Berbasis Data Spasial: Menggunakan data spasial untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan intervensi kebijakan distribusi pangan.
4. Integrasi Edukasi Gizi: Mengintegrasikan edukasi gizi dalam sistem pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik.
5. Penguatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan: Membangun sistem informasi ketahanan pangan yang kuat untuk memantau dan mengantisipasi potensi krisis pangan

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, indikator Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar

Keamanan pangan secara definisi adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Kualitas dari bahan baku pangan olahan yang berasal dari pangan segar, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti residu pestisida dan obat-obatan terkait perlakuan on-farm pada saat budidaya, serta sifat genetik/kemungkinan transgenik.

Penanganan pasca panen yang kurang tepat, penyimpanan yang kurang memperhatikan sifat bahan pangan juga akan

menurunkan mutu dan kualitas pangan. Demikian pula alat dan cara pengolahan pangan yang tidak tepat juga berpotensi mengurangi kandungan gizi, seperti pemasakan yang terlalu lama, mengalami oksidasi, atau kurang higienenya peralatan yang digunakan juga dapat menimbulkan masalah apabila makanan tersebut dikonsumsi.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang keamanan pangan adalah tingkat keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu secara rutin dilakukan pemeriksaan sampel pangan, sampai dengan 2026 triwulan II ada 62 sampel uji terdapat 7 sample diatas ambang batas dan 55 sampel aman.

Tabel 2.12.
Capaian Persentase bahan pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman
Tahun 2021-2026 Triwulan II

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	100	100	100	98,37	93,10	88.71

Tabel 2.13
Rekapitulasi Hasil Uji Pangan segar asal Tumbuhan
Tahun 2021-2026 Triwulan II

No	Tahun	Jumlah sample	Jenis Sample	Hasil Tes
1	2021	55	Sayuran	negatif
2	2022	42	2 beras, 40 sayuran dan buah	negatif
3	2023	85	Sayuran dan buah	1 sample mengandung formalin
4	2024	123	sayuran	121 sample aman, 1 sample positif formalin 1 sample residu pestisida diatas ambang batas
5	2025	145	Aneka komoditas hortikultura	10 sampel melebihi ambang batas residu pestisida,
6	2026	62	Aneka komoditas hortikultura	7 sampel melebihi ambang batas

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Faktor pendorong indikator tersebut adalah

1. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha pangan, petani, dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan standar keamanan pangan dalam proses produksi,

2. Penanganan, hingga distribusi pangan segar. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga terkait turut mendorong pelaku usaha untuk menerapkan praktik penanganan pangan yang baik.
3. Pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap produk pangan segar yang beredar di masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan pangan.
4. Ketersediaan regulasi serta pedoman teknis mengenai keamanan pangan segar turut menjadi landasan bagi pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

Faktor lain yang mendukung adalah semakin berkembangnya sistem rantai pasok pangan yang lebih baik, termasuk peningkatan fasilitas penyimpanan, transportasi, dan distribusi yang mampu menjaga kesegaran dan kualitas pangan hingga sampai ke konsumen.
Faktor penghambat indikator tersebut adalah

1. Terbatasnya pemahaman dan kesadaran sebagian pelaku usaha pangan, khususnya pada skala kecil, terhadap standar keamanan pangan dan cara penanganan pangan segar yang baik.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas penyimpanan, alat transportasi yang memadai, serta teknologi pascapanen juga dapat mempengaruhi kualitas pangan segar yang beredar di masyarakat. Proses distribusi yang panjang dan kurang terjaganya rantai dingin (cold chain) juga dapat menyebabkan penurunan mutu produk pangan.
3. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan dan pengujian mutu pangan secara menyeluruh juga menjadi tantangan, sehingga belum seluruh produk pangan segar dapat terpantau secara optimal.

Untuk meningkatkan persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, diperlukan berbagai langkah strategis yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui :

1. Peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan, petani, serta pedagang mengenai penerapan cara produksi pangan yang baik dan penanganan pangan segar yang higienis.

2. Penguatan sistem pengawasan dan pengujian keamanan pangan juga perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan monitoring, sampling, dan pengujian laboratorium terhadap pangan segar yang beredar di pasar.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan sarana prasarana pengawasan guna mendukung efektivitas pengendalian mutu pangan.
4. Peningkatan edukasi kepada masyarakat sebagai konsumen agar lebih selektif dalam memilih pangan segar yang aman dan berkualitas.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan kualitas dan keamanan pangan segar yang beredar dapat terus meningkat sehingga mampu melindungi kesehatan masyarakat.

1.2 URUSAN PERIKANAN

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, indikator Jumlah produksi perikanan tangkap

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah indikator yang mencerminkan besarnya hasil penangkapan ikan oleh nelayan dalam suatu periode tertentu. Indikator jumlah produksi perikanan tangkap menggambarkan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan serta kinerja sektor perikanan tangkap dalam mendukung penyediaan pangan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Tingkat produksi perikanan tangkap dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sumber daya ikan di perairan, jumlah dan kapasitas armada penangkapan, alat tangkap yang digunakan, serta kemampuan dan pengalaman nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Tabel 2.14.
Capaian Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2026 TW II

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	na	Na	na	140,12	140,18	84.8

Upaya untuk mencapai target Jumlah Produksi Perikanan Tangkap antara lain:

- Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan produksi perikanan tangkap.
- Peningkatan keterampilan nelayan dalam menggunakan teknologi dan metode penangkapan ikan yang lebih efektif dapat membantu meningkatkan produksi perikanan tangkap.
- Kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, nelayan, dan stakeholder lainnya dapat membantu meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target nilai jumlah produksi perikanan tangkap antara lain :

- Kerusakan lingkungan dapat mengurangi populasi ikan dan habitatnya.
- Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola perkembangbiakan dan ketersediaan stok ikan.
- Kerjasama yang kurang: kerja sama yang kurang antara nelayan, pemerintah, dan stakeholder lainnya dapat menghambat pengelolaan perikanan yang efektif.
- Penggunaan alat tangkap yang dilarang dan tidak ramah lingkungan
- Berkembangbiaknya ikan predator di perairan umum.

Sedangkan faktor Pendorong pencapaian target jumlah produksi perikanan tangkap antara lain :

- Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan aktif mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat.
- Banyak kampanye kesehatan menekankan pentingnya mengkonsumsi ikan demi mendapatkan asupan gizi yang seimbang.
- Ikan dianggap sebagai sumber protein yang baik dan memiliki manfaat kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung dan stroke.
- Kegiatan restocking ikan di perairan terbuka untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Tabel. 2.15.
Daftar Pemberian Bantuan Benih ikan untuk *Restocking* Ikan
Tahun 2026

NO	TANGGAL	PENERIMA	JENIS IKAN	JUMLAH (EKOR)	ASAL BENIH
1	18 April 2026	GP Ansor Temanggung	Nilem	2.000	Produksi BBI
2	13 Mei 2026	STAINU	Nilem	2.000	Produksi BBI
3	21 Mei 2026	Desa Banjarsari Kec. Ngadirejo	Nilem	5.000	Pengadaan
4	25 Mei 2026	Desa Gesing Kec. Kandangan	Nilem	5.000	Pengadaan
5	13 Juni 2026	Karang Taruna Temanggung	Nilem	3.000	Produksi BBI
6	13 Juni 2026	Desa Lempuyang Kec. Candiroto	Nilem	3.000	Pengadaan
7	13 Juni 2026	Desa Kedu Kec. Kedu	Nilem	2.500	Pengadaan
8	13 Juni 2026	Desa Munggangsari kec. Ngadirejo	Nilem	2.500	Pengadaan
9	14 April 2026	Kelurahan kebonsari Temanggung	Nilem	1000	APBD Prov
10	14 April 2026	Ds Gunungpayung, Candiroto	Nilem	1500	APBD Prov
11	14 April 2026	Ds Barang, Jumo	Nilem	1500	APBD Prov
12	14 April 2026	Ds Kedawung, Kandangan	Nilem	1500	APBD Prov
13	14 April 2026	Pokmaswas Guntur	Nilem	2500	APBD Prov
14	14 April 2026	Desa Gesing, Kandangan	Nilem	2000	APBD Prov
			TOTAL	**35.000**	

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, indikator jumlah produksi perikanan budidaya

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya merupakan total hasil panen dari kegiatan budidaya ikan dan komoditas perikanan lainnya dalam jangka waktu tertentu, yang mencerminkan tingkat produktivitas dan kinerja subsektor perikanan budidaya.

Tabel 2.16
Capaian Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	13.873,97	12.532,54	13.419,74	10.670,41	10.671,40	6.771,33

Peningkatan produksi perikanan budidaya membutuhkan sinergi antara pembudidaya ikan, pemerintah, swasta, dan teknologi. Dengan mengatasi hambatan modal, penyakit, dan akses pasar, serta memanfaatkan dukungan sumber daya alam dan teknologi modern, maka potensi perikanan budidaya sangat menarik.

Faktor Pendukung

- Sumber daya perairan dan keanekaragaman hayati yang mendukung budidaya ikan.
- Permintaan pasar tinggi: Konsumsi ikan masyarakat terus meningkat

- Teknologi budidaya: Inovasi seperti bioflok, RAS (Recirculating Aquaculture System), dan pakan buatan berkualitas.
- Dukungan pemerintah: Program bantuan berupa paket budidaya bioflok, bantuan benih, paket budidaya ikan, dan akses kredit usaha rakyat (KUR) untuk pembudidaya.
- Tenaga kerja: Banyak masyarakat pedesaan yang bisa terlibat dalam usaha budidaya ikan.

Tabel 2.17.
Daftar pemberian bantuan benih dan sarana prasarana budidaya ikan
Tahun 2026

APBN (Bantuan Benih)

NO	NAMA POKDAKAN	ALAMAT	KECAMATAN	KABUPATEN	KETERANGAN			TANGGAL
					NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	
1	MINA SARI KUMPUL	DS. KARANGSARI, DS. WATUKUMPUL	PARAKAN	TEMANGGUNG	BENIH NILA	50.000	EKOR	30 Juni 2026
2	MINA TIRTA	DSN. BULU, DS. REJOSARI	WONOBOYO	TEMANGGUNG	BENIH LELE	40.000	EKOR	30 Juni 2026
3	SARI TANI	DSN. MADUSARI, DS. KENTENGSARI	CANDIROTO	TEMANGGUNG	BENIH NILA	50.000	EKOR	30 Juni 2026
4	MINA SOBO KEDUNG	DS. MUNENG	CANDIROTO	TEMANGGUNG	BENIH LELE	50.000	EKOR	30 Juni 2026
5	MINA SENDANG REJEKI	DS. CANDIROTO	CANDIROTO	TEMANGGUNG	BENIH NILA	50.000	EKOR	30 Juni 2026
6	MINA SRI BAROKAH	DS. TEGALSARI	KEDU	TEMANGGUNG	BENIH LELE	25.000	EKOR	30 Juni 2026
7	MINA TANI MAKMUR	DS. TEGALSARI	KEDU	TEMANGGUNG	BENIH NILA	15.000	EKOR	30 Juni 2026

APBN (bantuan induk ikan)

NO	NAMA POKDAKAN	ALAMAT	KECAMATAN	KABUPATEN	KETERANGAN			TANGGAL
					NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	
1	Mina Unggul	dsn. Joho, Ds. Wonoboyo, Kec. Wonoboyo	Wonoboyo	TEMANGGUNG	NILA	100.000	EKOR	30 Juni 2026

APBN (Bioflok)

NO	NAMA POKDAKAN	ALAMAT	KECAMATAN	KABUPATEN	KETERANGAN			TANGGAL
					NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	
1	BERKAH USAHA MINA	DSN. CARIKAN, DS. GONDANGWINANGUN	NGADIREJO	TEMANGGUNG	BIOFLOK LELE		unit	Juni 2026
2	MINA KARYA MANDIRI	DSN. PESANTREN, DS. PESANTREN	WONOBOYO	TEMANGGUNG	BIOFLOK LELE			

APBD (Pokir)

NO	NAMA POKDAKAN	ALAMAT	KECAMATAN	KABUPATEN	KETERANGAN	TANGGAL
1	Pokdakan Karya Usaha	- Desa Gesing	Kandangan	Temanggung	HIBAH UANG	21 Mei 2026
2	Pokdakan Mina Rejeki	- Desa Wadas	Kandangan	Temanggung	HIBAH UANG	21 Mei 2026
3	Pokdakan Mega Merdeka	- Desa Tepusen	Kaloran	Temanggung	HIBAH UANG	21 Mei 2026
4	Pokdakan Mina Waris Rejeki	- Desa Tegallurung	Bulu	Temanggung	HIBAH UANG	21 Mei 2026
5	Pokdakan Berkah Jaya	- Desa Guntur	Temanggung	Temanggung	HIBAH UANG	21 Mei 2026
6	Pokdakan Benih Kemakmuran	- Kelurahan Tlogorejo	Temanggung	Temanggung	HIBAH UANG	21 Mei 2026
7	Pokdakan Mina Dadi Mulyo	- Desa Kebumen,	Pringsurat	Temanggung	HIBAH UANG	21 Mei 2026

Faktor Penghambat

- Keterbatasan modal: Biaya investasi kolam, pakan, dan teknologi cukup tinggi bagi pembudidaya kecil.
- Kualitas benih & pakan: Benih unggul dan pakan berkualitas belum merata distribusinya.
- Penyakit ikan: Wabah penyakit (misalnya aeromonas, streptococcus) dapat menurunkan produksi drastis.
- Lingkungan & iklim: Perubahan iklim, kualitas air menurun, dan pencemaran perairan menghambat budidaya.
- Akses pasar terbatas: Pembudidaya kecil sering kesulitan menjual hasil dengan harga layak karena rantai distribusi panjang.
- Keterbatasan pengetahuan: Sebagian pembudidaya belum familiar dengan teknologi modern dan manajemen usaha.

Upaya yang perlu dilakukan:

1. Penguatan kelembagaan & SDM
    - Pelatihan teknis budidaya, manajemen usaha, dan pengendalian penyakit.
    - Pembentukan kelompok pembudidaya untuk memperkuat posisi tawar.
2. Peningkatan akses teknologi
    - Penerapan sistem bioflok atau RAS untuk efisiensi pakan dan kualitas air.
    - Penggunaan aplikasi digital untuk monitoring kualitas air dan pemasaran hasil.
3. Dukungan finansial & kebijakan
    - Subsidi pakan dan benih unggul.
    - Akses kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
4. Pengendalian lingkungan & kesehatan ikan
    - Penerapan biosekuriti ketat untuk mencegah penyakit.
    - Pengelolaan limbah budidaya agar tidak mencemari lingkungan.

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan

Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah indikator yang mengukur tingkat ketaatan pelaku usaha (penangkapan, budidaya, pengolahan, distribusi, pemasaran) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Tabel 2.18.
Realisasi Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan
Tahun 2021-2026 TW II

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	na	na	na	na	28,57	24,49

Realisasi capaian indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan tahun 2026 sebesar 28,57% (masih menggunakan angka Tahun 2025). Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi regulasi secara berkelanjutan, sehingga pelaku usaha semakin memahami kewajiban dan ketentuan usaha perikanan.
2. Peran aktif penyuluh perikanan dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama dalam pemenuhan aspek legalitas usaha.
3. Kemudahan akses pelayanan perizinan usaha, yang semakin mempermudah pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya.
4. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha, terutama untuk mendukung pemasaran dan meningkatkan daya saing produk perikanan.
5. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengawasan secara berkala, sehingga mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun beberapa kendala yang masih mempengaruhi pencapaian indikator tersebut antara lain:

1. Masih terbatasnya pemahaman sebagian pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya pada pelaku usaha skala kecil.
2. Keterbatasan jumlah dan jangkauan petugas pengawas, sehingga kegiatan monitoring belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah.
3. Belum optimalnya pelaporan administrasi usaha oleh pelaku usaha, seperti pencatatan produksi maupun pelaporan kegiatan usaha.

4. Persepsi sebagian pelaku usaha bahwa proses perizinan cukup kompleks, sehingga masih terdapat usaha perikanan yang belum memiliki legalitas secara lengkap.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan di lapangan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian indikator persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan pada tahun berikutnya, beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha perikanan mengenai regulasi, standar usaha, serta kewajiban pelaku usaha perikanan.
2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara lebih intensif kepada kelompok pelaku usaha, khususnya bagi usaha perikanan skala kecil agar mampu memenuhi persyaratan usaha yang berlaku.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan perizinan usaha, sehingga proses pengurusan legalitas usaha dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
4. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan pengawasan lapangan secara berkala, guna memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.
5. Mengoptimalkan peran penyuluh perikanan dalam pembinaan dan pengawasan usaha perikanan di wilayah binaan.
6. Mengembangkan sistem pendataan dan pemantauan pelaku usaha perikanan secara lebih terintegrasi, guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, indikator Jumlah produksi pengolahan ikan

Jumlah produksi pengolahan ikan adalah total jumlah produksi hasil pengolahan ikan dalam 1 tahun. Dalam TW II Tahun 2026 capaian Jumlah produksi pengolahan ikan sebesar 91.1 ton dengan target tahun 2026 sebesar 395,752 ton.

Tabel 2.19.
Capaian Jumlah produksi pengolahan ikan Tahun 2021-2026 TW II

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah produksi pengolahan ikan (ton)	395,749	395,750	395,752	395,752	395.752	191.6

Faktor pendukung

a. Ketersediaan bahan baku: Produksi perikanan budidaya dan tangkap tinggi, sehingga pasokan ikan melimpah.
b. Permintaan pasar tinggi: Konsumsi ikan masyarakat terus meningkat, ditambah peluang produk olahan (fillet, nugget, abon, ikan asap).
c. Teknologi pengolahan: Sudah tersedia teknologi pengolahan modern (freezer, cold storage, mesin pengasapan, vacuum packaging).
d. Dukungan pemerintah: Program industrialisasi perikanan, bantuan alat pengolahan, dan sertifikasi mutu (Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), HACCP, SNI).
e. Tenaga kerja: Banyak masyarakat yang bisa dilibatkan dalam usaha pengolahan

Tabel 2.20
Daftar Penerima Sarana Pengolahan hasil perikanan tahun 2025

Nama Penerima	Desa	Kecamatan	Jenis Bantuan	Jumlah (Unit)	Realisasi Kegiatan (%)	Keterangan	Sumber Anggaran
Poklahsar Rizky Seafood	Bengkal	Kranggan	Chest Freezer	1	100	Bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan	APBN
Poklahsar Sudut Bahari	Tembarak	Tembarak	Chest Freezer	1	100	Bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan	APBN
Poklahsar Lele Mina Brana	Guntur	Temanggung	Chest Freezer	2	100	Bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan	APBN
Poklahsar Kurtina Sanse	Gambasan	Selopampang	Chest Freezer	2	100	Bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan	APBN
Poklahsar Puspa Arum	Kruwisan	Kledung	Peralatan Pengolahan Keripik	1	100	Bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan	APBN

Faktor Penghambat

- Keterbatasan modal: Mesin pengolahan, cold storage, dan fasilitas sertifikasi membutuhkan biaya besar.
- Kualitas bahan baku: Ikan memiliki protein yang tinggi sehingga akan cepat rusak jika tidak ditangani dengan penerapan rantai dingin (cold chain) yang baik.
- SDM terbatas: Masih banyak pengolah ikan skala kecil yang belum terlatih dalam menggunakan teknologi modern, belum menerapkan cara berproduksi yang baik dan belum menerapkan standar sanitasi yang baik sesuai standar mutu yang berlaku.
- Akses pasar terbatas: Produk olahan ikan lokal sering kalah bersaing dengan produk impor atau industri besar.
- Infrastruktur kurang memadai: Distribusi ikan segar dan olahan terkendala transportasi, listrik, dan fasilitas penyimpanan.
- Regulasi & sertifikasi: Proses sertifikasi mutu dan izin edar sering dianggap rumit oleh pelaku usaha kecil.

Upaya yang Harus Dilakukan

1. Penguatan SDM & Kelembagaan
    - Pelatihan pengolahan ikan higienis, pengemasan modern, dan manajemen usaha.
    - Pembentukan kelompok pengolah ikan untuk memperkuat posisi tawar.
2. Peningkatan Teknologi & Infrastruktur
    - Penyediaan cold storage, mesin pengolahan, dan fasilitas rantai dingin di sentra produksi.
    - Pemanfaatan teknologi pengolahan sederhana (pengasapan, pengeringan, fermentasi) untuk UMKM.
3. Dukungan Finansial & Kebijakan
    - Akses kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengolah ikan.
    - Subsidi alat pengolahan dan sertifikasi mutu dari pemerintah.
4. Pengembangan Pasar
    - Pemasaran digital melalui e-commerce dan media sosial.
    - Kemitraan dengan industri besar dan restoran.
    - Sertifikasi mutu (HACCP, SNI, halal) untuk meningkatkan daya saing di pasar ekspor.

1.3 URUSAN PERTANIAN

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan 15 indikator kinerja

a. Produktivitas Tanaman Pangan

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Tanaman pangan yang menjadi komoditas utama di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah Padi dan Jagung.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman pangan diperoleh dari produktivitas tanaman pangan utama di Kabupaten Temanggung yaitu: tanaman padi dan jagung.

Produktivitas tanaman pangan di kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.21.
Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan 2021-2026 TW II

No.	Indikator	Satuan	TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	**Produktivitas Padi**							
	Luas Panen	ha	20.553,80	16.784,3	18.038,8	14.802	16.516	13.141,4
	Produksi	ton	121.262,700	105.992,7	114.471,7	91.022,2	100.582,3	79.242,3
	Produktivitas	ton/ha	5,9	6,315	6,346	6,149	6,09	6,03
2.	**Produktivitas Jagung**							
	Luas Panen	ha	8.580,3	5.714,7	8.395,50	6.264	7.746,4	5.833.2
	Produksi	ton	38.611,35	26.344,6	38.619,5	36.057,4	39.119,3	30.682,7
	Produktivitas	ton/ha	4,500	4,61	4,6	5,76	5.05	5,0

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sampai denganTahun 2026 triwulan II untuk produktivitas padi sebesar 6,03 ton/ha dan jagung sebesar 5.26 ton/ha. Produktivitas padi dan jagung menggambarkan tingkat kemampuan lahan dalam menghasilkan produksi per satuan luas lahan (ton per hektar). Peningkatan produktivitas mencerminkan keberhasilan pemanfaatan sarana produksi pertanian, teknologi budidaya, serta pengelolaan usaha tani yang lebih efisien. Melalui program ini, pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dukungan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan.

Secara umum, peningkatan produktivitas padi dan jagung menunjukkan bahwa intervensi program penyediaan sarana pertanian telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi pertanian. Hal ini juga mencerminkan meningkatnya kemampuan petani dalam mengoptimalkan penggunaan sarana produksi serta penerapan teknologi budidaya yang lebih baik.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan produktivitas padi dan jagung antara lain:

1. Ketersediaan benih unggul yang memiliki potensi hasil tinggi dan lebih tahan terhadap hama serta penyakit tanaman.
2. Dukungan sarana produksi pertanian, seperti pupuk, pestisida, dan alsintan yang membantu meningkatkan efisiensi proses budidaya.
3. Peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan dan pendampingan, sehingga petani dapat menerapkan teknologi

budidaya yang lebih tepat.

4. Kondisi lahan dan sistem irigasi yang relatif mendukung, terutama pada lahan sawah yang memiliki ketersediaan air yang cukup, bantuan Pembangunan/rehabilitasi irigasi usaha tani (perpompaan).
5. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan produksi pangan, termasuk program bantuan sarana produksi, peningkatan HPP padi dan jagung diharapkan dapat menstimulasi petani tanaman pangan, kenaikan harga beras di tingkat konsumen menyebabkan petani menanam padi minimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga sendiri,

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan produktivitas padi dan jagung, antara lain:

1. Perubahan iklim dan ketidakpastian cuaca, yang mempengaruhi pola tanam serta risiko kekeringan atau banjir.
2. Keterbatasan ketersediaan pupuk bersubsidi atau distribusi yang belum sepenuhnya tepat waktu.
3. Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti hama dan penyakit yang dapat menurunkan hasil produksi.
4. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang berpotensi mengurangi luas lahan produksi tanaman pangan.
5. Keterbatasan regenerasi petani dan adopsi teknologi, dimana sebagian petani masih menggunakan metode budidaya konvensional.

Keberhasilan peningkatan produktivitas padi dan jagung memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, karena hasil panen yang meningkat akan berdampak pada peningkatan nilai produksi.
2. Menjaga stabilitas ketersediaan pangan daerah, terutama beras dan jagung sebagai komoditas pangan strategis.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.
4. Mengurangi risiko kerawanan pangan, karena produksi pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

5. Menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan sektor pendukungnya, seperti pengolahan hasil dan distribusi pangan.

Peningkatan produktivitas padi dan jagung juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai indikator pembangunan daerah lainnya, seperti peningkatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi pangan, serta peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

b. Produktivitas Tanaman Hortikultura

Istilah hortikultura sendiri asalnya dari bahasa latin yaitu dari kata *Hortus* artinya kebun, dan kata *Culture* artinya bercocok tanam. Jadi secara umum holtikultura adalah segala kegiatan bercocok tanam seperti sayur-sayuan, buah-buahan, ataupun tanaman hias dimana lahan (kebun atau pekarangan rumah) sebagai tempatnya.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman hortikultura diperoleh dari produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Temanggung yaitu untuk sayuran : bawang putih, bawang merah, cabe rawit, cabe keriting.

Produktivitas tanaman hortikultura di kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.22.
Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026 TW II

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bawang Putih						
	Luas panen (ha)	1.591	1.169,5	1469,5	1.319	963	926
	Jumlah produksi(ton)	10.355,3	8.088,4	10493,3	9.631,2	6.898	7.478,6
	Produktivitas (ton/ha)	6.51	6,916	7,141	7,302	7,163	8,08
2	Bawang Merah						
	Luas panen (ha)	1.555	2.304	2335,5	2.779,5	2.816,5	1.304
	Jumlah produksi (ton)	11.102,1	18.662,4	17901,8	21.263,18	22.932,7	11.193,1
	Produktivitas (ton/ha)	7.140	8,1	7,665	7,65	8,14	8,58
3	Cabai Rawit						
	Luas panen (ha)	2.977,50	5.045,5	6900	7.583,5	10.093	8.809
	Jumlah Produksi (ton)	20.802.930	38.525,415	52095,0	56.876,2	74.486,34	64.481,9

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Produktivitas (ton/ha)	6,987	7,636	7,55	7,5	7,38	7,32
4	Cabai Keriting						
	Luas panen (ha)	na	na	na	na	4.690,2	3.791,9
	Jumlah Produksi (ton)	na	na	na	na	35.458	28.135,9
	Produktivitas (ton/ha)	na	na	na	na	7,56	7,42

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2026 produksi bawang putih 7.478,6 ton dengan luas panen 926 ha, Produksi bawang merah sebanyak 11.193,1 ton dengan luas panen 1.304 Ha, produksi cabai rawit sebanyak 64.481,9 ton dengan luas panen 8.809 ha dan cabai keriting produksi sebesar 28.135,9 ton dengan luas panen 3.791,9 ha. Animo masyarakat tinggi untuk menanam cabai yang berpengaruh juga pada penerapan GAP dan GHP yang semakin baik dari tahun sebelumnya supaya lama waktu panen makin panjang.

Kenaikan dan penurunan produksi komoditas hortikultura ini erat kaitannya dengan peralihan komoditas yang dibudidayakan oleh petani (tanaman pangan beralih ke hortikultura, tembakau beralih ke tanaman hortikultura) Hal ini disebabkan oleh meningkatnya animo/trend petani untuk budidaya tanaman hortikultura karena harga jual yang lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan, serta tata niaga tanaman hortikultura yang jelas dibanding dengan komoditas yang lain.

Peningkatan produktivitas bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan cabai keriting menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan teknologi budidaya serta pemanfaatan sarana produksi yang lebih optimal. Produktivitas yang meningkat mengindikasikan bahwa petani mampu mengoptimalkan penggunaan lahan serta mengelola faktor produksi secara lebih efisien.

Di sisi lain, komoditas hortikultura memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi pangan, karena cabai dan bawang merupakan komoditas yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga bahan pokok. Dengan meningkatnya produktivitas, diharapkan pasokan komoditas hortikultura di tingkat daerah dapat lebih stabil sehingga mampu menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan produktivitas komoditas hortikultura antara lain:

1 Ketersediaan benih atau bibit unggul hortikultura yang memiliki produktivitas tinggi dan lebih adaptif terhadap kondisi agroklimat setempat.
2 Dukungan sarana produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, mulsa, dan sarana budidaya lainnya yang membantu meningkatkan efisiensi produksi.
3 Pendampingan dan penyuluhan kepada petani hortikultura dalam penerapan teknologi budidaya yang baik (Good Agricultural Practices).
4 Kondisi agroklimat yang mendukung, khususnya pada wilayah dataran tinggi yang sangat cocok untuk pengembangan komoditas hortikultura.
5 Tingginya permintaan pasar terhadap komoditas hortikultura, yang mendorong petani untuk meningkatkan intensitas dan kualitas budidaya.lama, kegiatan bantuan pengembangan kawasan bawang merah dan champion cabai melalui APBN..

Faktor penghambat peningkatan produksi tanaman hortikultura seperti :

1. Perubahan iklim menyebabkan jadwal tanam mundur karena keterbatasan ketersediaan air, peningkatan serangan hama dan penyakit,
2. Masuknya bawang putih impor sehingga konsumen lebih memilih bawang putih impor dengan umbi yang berukuran besar daripada bawang putih local serta belum kompetitifnya harga bawang putih local (harga jual bawang putih local kurang sebanding dengan biaya produksi/usaha tani),
3. Harga saprodi yang terus naik,
4. Penerapan GAP dan GHP yang belum sesuai,
5. Bawang merah belum punya kemandirian produk benih, harga benih bawang merah pada saat musim tanam cenderung mahal,
6. Tenaga kerja pertanian yang mahal,
7. Terbatasnya pilihan varietas cabai yang memiliki adaptasi luas dan tahan OPT,
8. Terbatasnya pengembangan bawang merah off season khususnya penanaman pada musim penghujan, penerapan

budidaya menggunakan biji atau True Shailot Seed (TSS) yang masih terbatas (Bawang merah),

9. Penggunaan sarana pengendali OPT ramah lingkungan belum optimal (penggunaan pestisida terlalu tinggi mengakibatkan terjadi n ya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah),
10. Kenaikan harga saprodi terutaman benih (bawang merah) dan pupuk yang menyebabkan biaya produksi semakin tinggi

Untuk mengatasi hal tersebut dan mempertahankan produksi dilakukan beberapa langkah yaitu:

1 Pengembangan Kawasan hortikultura strategis dengan Kerjasama para petani champion cabai dan bawang merah yang dapat berkontribusi dalam pemenuhan pasokan dan pengendalian inflasi (APBN),

2 Kerjasama dengan BRIN untuk kajian komoditas bawang putih, bawang merah dan cabai, melaksanakan pengembangan bawang putih lokal varietas Geol Temanggung Agrihorti, dimana varietas tersebut memiliki ukuran umbi yang lebih besar dibanding varietas bawang putih lokal lainnya,

3 Peningkatan jejaring pemasaran,

4 Pendampingan dan fasilitasi bantuan sarana prasarana pra panen dan pasca panen,

5 Penanganan hama dan penyakit secara lebih dini dan pelatihan GAP (*Good Agricultural Practices*) dan GHP yang benar,

6 Pelatihan pembuatan pupuk organic guna antisipasi kelangkaan pupuk di pasaran,

7 Bimtek pengolahan pasca panen komoditas hortikultura,

8 Monitoring realisasi alokasi pengembangan kawasan komoditas strategis berikut rencana panen dan produksinya.

9 KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait info iklim dari BMKG sebagai *Early Warning System* (EWS) khususnya musim penghujan untuk menjaga stabilitas produksi dimusim hujan.

Rekomendasi kedepan untuk mempertahankan produksi komoditas hortikultura strategis yaitu pengembangan Kawasan hortikultura strategis dengan tetap memperhatikan hasil pemetaan lahan sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat serta mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan pengembangan kompetensi petani

dan penyuluh, peningkatan fasilitasi bantuan saprodi dan sarpras pra panen dan pasca panen, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.

Keberhasilan peningkatan produktivitas komoditas hortikultura memberikan berbagai manfaat strategis bagi masyarakat, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani hortikultura, karena komoditas hortikultura memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi.
2. Menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan strategis, khususnya cabai dan bawang yang sangat mempengaruhi inflasi daerah.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor pertanian dan perdagangan hasil pertanian.
4. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, karena komoditas hortikultura merupakan sumber penting vitamin dan mineral.
5. Menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja di sektor pertanian dan agribisnis hortikultura.

c. Produktivitas Tanaman Perkebunan

Definisi perkebunan menurut Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan adalah pengelolaan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim/tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pertanian. Tanaman perkebunan dapat dikelompokan menjadi tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim merupakan tanaman yang hanya dapat tumbuh selama satu musim pada tahun tersebut atau bisa dikatakan tumbuhan tahunan yang dapat dipanen cepat sebelum musim berakhir. Tanaman tahunan adalah suatu tumbuhan yang dapat tumbuh lebih dari dua tahun bahkan lebih dari puluhan tahun. Tanaman tahunan biasanya merujuk pada tumbuhan berkayu keras.

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman perkebunan diperoleh dari produktivitas tanaman perkebunan utama di Kabupaten Temanggung yaitu : tembakau, kopi robusta, kopi arabika.

Berikut data produktivitas tanaman perkebunan selama tahun 2020 - 2025 terakhir dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.23
Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026 TW II

Uraian		Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Tembakau**						
	Luas panen (ha)	18.293,08	15.801	14.764	14.088	13.133,5	13.133,5
	Jumlah produksi (ton)	12.585,639	10.562,6	9.685,73	9.438,96	8.824,2	8.824,2
	Produktivitas (ton/ha)	0,688	0,668	0,656	0.67	0.6719	0.6719
2	**Kopi Robusta**						
	Luas panen (ha)	11.724,46	12.977,37	12.972,2	11.193,972	11.193,9	11.193,9
	Jumlah produksi (ton)	83.841,6	8.994,321	8.476,9	8.329,436	8.171,54	8.171,54
	Produktivitas (ton/ha)	0,715	0,693	0,653	0,744	0,730	0,730
3	**Kopi Arabika**						
	Luas panen (ha)	1.564,36	1.699,95	1.724,95	1.177,33	1.177	1.177
	Jumlah Produksi (ton)	955,24	1.002,97	992,434	649,288	659,28	659,28
	Produktivitas (ton/ha)	0,611	0,65	0,575	0,551	0,56	0,56

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Triwulan II

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja komoditas Perkebunan masih menggunakan data 2025 karena statistic Perkebunan dilaksanakan tiap semester. Komoditas tembakau Tahun 2025 sebanyak 8.824,2 ton dengan luas panen 13.133,5 ha dibandingkan tahun Tahun 2024 sebesar 94.389,6 kw dengan luas panen sebesar 14.088,0 ha, terjadi penurunan produksi dan luas panen. Hal ini disebabkan animo masyrakat yang menurun dikarenakan kepastian/trend harga yang tiap tahun tidak ada perbaikan sementara biaya produksi tinggi. Realisasi kinerja kopi robusta Tahun 2025 produksi sebesar 81.715,4 kw dengan luas panen 11,193.9 kw, dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 83.294,36 kw dan luas panen sebesar 11.193,97 ha, terjadi penurunan produksi dan kopi arabica produksi tahun 2025 sebanyak 6.592,8 kw dengan luas panen 1,177 ha dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 6.492,88 kw dan luas panen sebesar 1.177,33 ha, terjadi keiankan produksi.

Adapun faktor pendorong indikator komoditas perkebunan diantaranya:

1. Kondisi geografis dan iklim mendukung untuk pertumbuhan kopi robusta, kopi arabika dan tembakau,
2. Harga kopi yang baik membuat petani bergairah untuk menanam serta melakukan peremajaan tanaman kopi,

3. Kemampuan berbudidaya sudah cukup dikuasai oleh petani,
4. Peningkatan jejaring pemasaran dengan pihak luar,
5. Fasilitasi bantuan saprodi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi kopi guna peningkatan produksi,
6. Menanam tembakau sudah menjadi budaya masyarakat temanggung, adanya kemitraan dengan perwakilan Perusahaan tembakau dalam hal budidaya dan pemasaran, GAP sudah dikuasi dengan baik oleh petani, ketersediaan varietas unggul Lokasi (Kemloko 1-8) yang dibagikan gratis kepada Masyarakat, animo masyarakat untuk konservasi lahan kritis di lereng gunung sumbing, tembakau dan prau dengan komoditas kopi arabica.

Faktor penghambat terkait dengan penurunan luas panen dan produksi komoditas tembakau disebabkan karena perubahan cuaca/iklim berpengaruh pada jadwal tanam, tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca baik pada masa tanam, saat panen maupun pasca panen, pada masa pertumbuhan), tata niaga yang tidak jelas sehingga kepastian harga yang tidak menentu (cenderung turun setiap tahun) mengakibatkan petani beralih ke komoditas yang lain yang lebih menguntungkan (hortikultura), harga saprodi yang mahal serta tenaga kerja pertanian yang mahal dan semakin terbatas mengakibatkan biaya usaha tani menjadi naik/mahal.

Faktor penghambat pada komoditas kopi robusta diantaranya banyaknya kopi yang sudah tua perlu diremajakan, perubahan iklim berpengaruh terhadap proses vegetatif dan generatif (pembungaan) menjadi terganggu sehingga produktivitas kopi turun hampir 40 % - 50 %, peningkatan serangan hama penyakit utamanya penggerek buah kopi (PBKo), belum adanya standart harga kopi (kopi organik dengan dengan kopi asalan tidak terpaut jauh) sehingga petani kurang berminat untuk budidaya kopi organik, dan untuk kopi arabica densitas tanaman kurang (kerapatan tanaman kurang) sehingga provitas untuk setiap luasan belum optimal, pola tanam kopi arabica sebagian besar secara tumpang sari dengan komoditas lain sehingga pola perawatan, pemupukan dan pemeliharaan belum optimal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan produksi meningkatkan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi)

terkait dengan informasi cuaca dari BMKG untuk menentukan masa tanam, pemberian bantuan pupuk NPK, ZA, pupuk organik dan bibit unggul untuk tanaman tembakau dan kopi, pelaksanaan program peremajaan tanaman kopi (khususnya robusta), peningkatan GAP dan GHP, peningkatan jejaring pemasaran, peningkatan gerakan pengendalian hama dan penyakit, bantuan bibit kopi dan entres untuk peremajaan, pembibitan tembakau untuk menambah densitas/kerapatan, fasilitasi serta pendampingan oleh PPL secara intensif, pemberian bantuan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen.

d. Jumlah Produksi Ternak Unggas

Jumlah Produksi Ternak Unggas merupakan total hasil produksi yang diperoleh dari usaha peternakan unggas dalam suatu periode tertentu.

Secara umum, indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat output sektor peternakan unggas di suatu wilayah. Rumus untuk menghitung jumlah produksi ternak unggas yaitu jumlah produksi peternakan meliputi daging ayam potong, ayam buras, burung puyuh, itik, entog, Ayam Ras Petelur Afkir pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.24
Jumlah Produksi Ternak Unggas
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026 TW II

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Produksi Ternak Unggas	6.528.249,60	6.556.753,87	6.578.999,35	6.329.369,93	6.537.554,12	4.698.242

Capaian TW II yang mencapai 4.698.242 kg dari target tahunan 6,243,337 kg. Capaian jumlah produksi ternak unggas menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan komoditas ternak lainnya. Hal ini disebabkan oleh siklus produksi unggas yang relatif cepat serta tingginya permintaan pasar terhadap daging ayam.

Penyediaan sarana produksi seperti bibit unggas, pakan, serta dukungan teknologi pemeliharaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan populasi dan produksi. Namun demikian, risiko penyakit unggas dan fluktuasi harga pakan masih menjadi tantangan yang memerlukan penguatan sistem biosekuriti dan manajemen usaha peternakan.

Faktor pendorong tercapainya produksi ternak unggas yaitu Peningkatan produksi ternak unggas didorong oleh pemberian nutrisi yang seimbang, kesehatan ternak yang terjaga melalui vaksinasi dan pengobatan rutin, serta lingkungan kandang yang nyaman dan terkelola baik. Faktor genetik unggul, ketersediaan air dan cahaya yang memadai, serta manajemen pemeliharaan yang baik turut meningkatkan produktivitas. Selain itu, pengawasan intensif terhadap kesehatan dan performa ternak menjadi kunci dalam memastikan produksi tetap optimal dan berkelanjutan.

Produksi ternak unggas dapat terhambat oleh serangan penyakit dan hama, kekurangan nutrisi, serta kondisi stres pada ternak. Lingkungan kandang yang buruk—termasuk suhu ekstrem, kelembaban tinggi, ventilasi tidak memadai, dan kebersihan yang rendah—juga menurunkan produktivitas. Kandang yang tidak layak dan pengelolaan pemeliharaan yang kurang baik semakin memperburuk performa produksi. Selain itu, cuaca ekstrem dapat menurunkan daya tahan dan produktivitas unggas, sehingga berdampak pada hasil produksi secara keseluruhan.

e. Jumlah Produksi Telur

Jumlah produksi telur merupakan indikator yang menunjukkan total hasil telur yang dihasilkan oleh ternak unggas dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat produktivitas usaha peternakan unggas pada subsektor produksi telur.

Tabel 2.25.
Jumlah Produksi Telur
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026 TW II

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Produksi Telur (kg)	8.495.064,51	9.292.137,95	9.789.065,76	8.774.200,21	8.888.810,54	5.619.866

Target produksi telur tahun 2026 ditetapkan sebesar 6,867,846 kg, sementara realisasi hingga Triwulan II mencapai 5.619.866 kg. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produksi telah mencapai 81.83% dari target tahunan. Faktor pendorong produksi telur meliputi peningkatan populasi ayam petelur serta perbaikan manajemen pakan dan pemeliharaan. Dukungan

program melalui penyediaan sarana produksi dan penguatan kelembagaan peternak turut mendorong stabilitas produksi telur di tingkat peternak. Meskipun demikian, produktivitas telur masih dipengaruhi oleh kualitas bibit, manajemen pakan, serta kondisi kesehatan ternak.

Faktor penghambat produksi telur meliputi serangan penyakit, kurangnya nutrisi, serta stres pada ternak yang menurunkan performa produksi. Lingkungan kandang yang buruk seperti suhu ekstrem, kelembapan tinggi, dan ventilasi tidak memadai juga menjadi kendala utama. Selain itu, kandang yang tidak layak, pengelolaan yang kurang optimal, serangan hama seperti kutu dan cacing, serta kondisi cuaca ekstrem semakin menghambat pencapaian target produksi.

Upaya peningkatan produksi telur dilakukan melalui pemberian nutrisi yang seimbang, pengelolaan lingkungan kandang yang nyaman, serta pengawasan kesehatan dan vaksinasi untuk mencegah penyakit. Manajemen kandang yang baik, pengurangan stres ternak, penggunaan bibit unggul, dan pemantauan produksi secara berkala juga menjadi langkah penting untuk memastikan produktivitas unggas tetap optimal.

f. Jumlah Produksi Daging Ternak Besar

Jumlah Produksi Daging Ternak Besar merupakan total hasil produksi daging yang dihasilkan dari ternak besar khususnya sapi potong dan kerbau dalam suatu periode tertentu dalam satuan kilogram (kg) dan menggambarkan jumlah daging yang dihasilkan dari pemotongan ternak besar di suatu wilayah.

Tabel 2.26.
Jumlah Produksi Daging Ternak Besar
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026 TW II

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Produksi Daging Ternak Besar (kg)	775.372	741.741	876.941	1.142.765,26	1.160.527,20	767.124

Target Produksi Daging Ternak Besar Tahun 2026 sebesar 807,654 kg, dengan Realisasi TW II sebanyak: 767.124kg. Capaian indikator jumlah produksi daging ternak besar menunjukkan bahwa ketersediaan sarana produksi seperti bibit unggul, pakan, serta dukungan layanan reproduksi ternak memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan bobot potong dan populasi ternak. Peningkatan produksi pada indikator ini

mencerminkan keberhasilan intervensi pemerintah dalam memperkuat kapasitas peternak serta memperbaiki sistem pemeliharaan ternak besar. Namun demikian, capaian produksi masih dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis seperti ketersediaan pakan hijauan, tingkat produktivitas indukan, serta pola pemeliharaan yang masih didominasi sistem tradisional.

Pencapaian yang baik, didukung oleh faktor pendorong antara lain penggunaan bibit sapi potong unggul yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas, didukung manajemen pakan bergizi yang mempercepat pertumbuhan ternak. Selain itu, pengendalian penyakit dan perawatan kesehatan hewan yang baik berperan penting dalam menekan angka kematian. Ketersediaan infrastruktur peternakan yang memadai juga meningkatkan efisiensi usaha peternakan. Akses pasar yang stabil turut mendorong motivasi peternak untuk meningkatkan produksi, ditambah pelatihan dan edukasi mengenai manajemen modern yang memperkuat kapasitas peternak.

Faktor penghambat produksi ternak besar meliputi keterbatasan lahan penggembalaan yang membatasi jumlah ternak yang dapat dipelihara, serta keterbatasan pakan berkualitas yang menurunkan produktivitas. Penyakit ternak juga menjadi ancaman serius karena dapat mengurangi populasi ternak yang sehat. Selain itu, akses yang terbatas terhadap bibit unggul dan tingginya biaya produksi menekan keuntungan peternak. Keterbatasan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas penyimpanan, turut menghambat distribusi dan pemasaran. Fluktuasi harga daging serta keterbatasan akses ke pasar menurunkan stabilitas pendapatan peternak. Di sisi lain, minimnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam manajemen modern juga berdampak pada rendahnya efisiensi dan produktivitas usaha peternakan.

Upaya pencapaian produksi daging ternak besar dilakukan melalui penggunaan bibit sapi potong unggul untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas daging, serta penerapan manajemen pakan yang baik guna memastikan kebutuhan nutrisi ternak terpenuhi. Penguatan manajemen kesehatan hewan, termasuk pengendalian penyakit dan perawatan rutin, juga menjadi langkah penting untuk menekan angka kematian. Selain itu,

pengembangan infrastruktur peternakan seperti kandang yang memadai dan fasilitas pengolahan pakan turut meningkatkan efisiensi produksi. Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada peternak mengenai teknologi peternakan modern mendorong peningkatan kualitas usaha. Pembukaan dan pengembangan akses pasar membantu memperluas peluang penjualan, sementara kemitraan antara peternak, pemerintah, dan industri dapat memperkuat rantai produksi. Pemanfaatan teknologi, baik informasi maupun bioteknologi, turut meningkatkan efisiensi. Di samping itu, pengembangan usaha peternakan rakyat juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan produksi daging ternak besar serta pendapatan masyarakat.

g. Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil

Jumlah produksi daging ternak kecil merupakan indikator yang menggambarkan total hasil produksi daging yang berasal dari ternak kecil khususnya kambing, domba dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai kapasitas produksi, ketersediaan daging ternak kecil, serta kontribusinya terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat maupun sektor peternakan daerah.

Tabel 2.27.
Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026 TW II

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil	235.170	260.442	251.790	267.057	417.341,82	437.740

Target jumlah produksi daging ternak kecil tahun 2026 ditetapkan sebesar 268,110 kg, realisasi hingga Triwulan II mencapai 437.740kg, sehingga capaian TW II sebesar 100% dari target. Faktor pendorong produksi daging ternak kecil meliputi penggunaan bibit unggul yang meningkatkan kualitas dan produktivitas, manajemen pakan bergizi yang menunjang pertumbuhan ternak, serta manajemen kesehatan hewan yang baik untuk menekan angka kematian. Infrastruktur peternakan yang memadai turut mendukung efisiensi produksi, pendidikan dan pelatihan mengenai teknologi modern, sementara pasar yang stabil meningkatkan motivasi peternak.

Faktor penghambat produksi daging ternak kecil antara lain keterbatasan lahan penggembalaan yang membatasi jumlah ternak, serta keterbatasan pakan berkualitas yang menurunkan produktivitas. Penyakit ternak juga menjadi ancaman yang mengurangi populasi ternak sehat, ditambah kurangnya akses terhadap bibit unggul. Biaya produksi yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur menghambat efisiensi distribusi serta pemasaran. Selain itu, fluktuasi harga dan minimnya akses pasar menurunkan stabilitas pendapatan peternak. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan peternak turut memperlemah efisiensi dan produktivitas usaha peternakan.

Upaya yang dapat dilakukan meliputi pengembangan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas, disertai manajemen pakan bergizi dan manajemen kesehatan hewan guna menekan penyakit serta kematian ternak. Penguatan infrastruktur peternakan—mulai dari kandang hingga fasilitas pakan—dapat meningkatkan efisiensi usaha. Pendidikan dan pelatihan bagi peternak, serta penggunaan teknologi modern, membantu meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Selain itu, pengembangan pasar, kemitraan antar pemangku kepentingan, serta penguatan usaha peternakan rakyat menjadi langkah penting untuk memperluas akses usaha dan meningkatkan pendapatan peternak.

h. Persentase kelahiran Pedet

Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut 'insemination gun'.Persentase kelahiran Pedet merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kegiatan inseminasi buatan.

Tujuan Inseminasi Buatan

- Memperbaiki mutu genetika ternak;
- Tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya;

- Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama;
- Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur;
- Mencegah penularan / penyebaran penyakit kelamin.

Keuntungan Inseminasi Buatan (IB)

- Menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan;
- Dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik;
- Mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina (inbreeding);
- Dengan peralatan dan teknologi yang baik sperma dapat simpan dalam jangka waktu yang lama;
- Semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati;
- Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar;
- Menghindari ternak dari penularan penyakit terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin.

Kerugian Inseminasi Buatan (IB)

- Apabila identifikasi birahi (estrus) dan waktu pelaksanaan IB tidak tepat maka tidak akan terjadi terjadi kebuntingan;
- Akan terjadi kesulitan kelahiran (distokia), apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan breed / turunan yang besar dan diinseminasikan pada sapi betina keturunan / breed kecil;
- Bisa terjadi kawin sedarah (inbreeding) apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang lama;
- Dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik (tidak melalui suatu progeny test).

Tabel 2.28
Realisasi Persentase kelahiran pedet Tahun 2021-2026 TW II

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase kelahiran pedet	na	na	na	48,3	64,15	52.54

Persentase kelahiran pedet diperoleh dari perhitungan jumlah akseptor IB sebanyak 1.300 ekor dibagi pedet yang lahir sejumlah 683 ekor. Persentase kelahiran pedet tahun 2026 ditetapkan sebesar 48%, realisasi hingga Triwulan II mencapai

52.54%, sehingga capaian TW I sebesar 100% dari target. Indikator persentase kelahiran pedet merupakan indikator penting dalam menggambarkan keberhasilan program peningkatan populasi ternak sapi. Tingkat kelahiran pedet yang meningkat menunjukkan efektivitas program peningkatan reproduksi ternak, termasuk pemanfaatan teknologi reproduksi dan peningkatan kualitas manajemen indukan. Namun demikian, keberhasilan indikator ini sangat dipengaruhi oleh kualitas induk, ketersediaan pakan, serta kemampuan peternak dalam mengelola reproduksi ternak secara optimal.

Faktor pendorong pencapaian target kinerja diantaranya:

1. Kab temanggung sebagai wilayah yang potensial utk pengembangan ternak sapi mengingat faktor geografis yang mendukung terutama ketersediaan pakannya,
2. Ketersediaan indukan berkualitas. Populasi sapi betina produktif yang sehat dan berada pada umur reproduktif meningkatkan peluang kebuntingan dan kelahiran.
3. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) yang Optimal. Keberhasilan program IB (ketepatan waktu inseminasi, kualitas semen beku, keterampilan inseminator) sangat menentukan angka kebuntingan.
4. Manajemen Pakan yang Baik. ketersediaan pakan hijauan dan konsentrat yang cukup dan bergizi meningkatkan kondisi tubuh induk, sehingga mendukung reproduksi.
5. Pelayanan kesehatan hewan. Pengendalian penyakit reproduksi seperti brucellosis, gangguan hormon dan lain-lain meningkatkan tingkat keberhasilan kelahiran.
6. Pendampingan dan penyuluhan peternak. Pengetahuan peternak tentang deteksi birahi, perawatan induk bunting, dan penanganan kelahiran sangat berpengaruh.
7. Animo masyrakat untuk IB tinggi.

Faktor penghambat pencapaian target diantaranya:

1. Rendahnya deteksi birahi oleh peternak (kesalahan atau keterlambatan mendeteksi birahi menyebabkan kegagalan IB atau kawin alam).
2. Kualitas pakan yang tidak memadai (kekurangan nutrisi menyebabkan gangguan reproduksi seperti anestrus (tidak birahi) atau keguguran)

3. Tingginya kasus gangguan reproduksi (seperti infertilitas, repeat breeding, atau penyakit reproduksi yang menurunkan angka kebuntingan).
4. Keterbatasan tenaga dan sarana IB (Jumlah inseminator terbatas, distribusi semen beku tidak merata, serta akses layanan yang sulit).
5. Manajemen pemeliharaan tradisional (peternak masih menggunakan sistem pemeliharaan sederhana tanpa pencatatan reproduksi yang baik).
6. Tingkat kematian pedet (kelahiran terjadi, tetapi pedet mati karena penanganan pasca lahir yang kurang baik).

Upaya pencapaian target peningkatan keberhasilan kelahiran pedet dilakukan melalui:

1. Peningkatan layanan inseminasi buatan. Penambahan dan peningkatan kapasitas inseminator, penyediaan semen beku berkualitas, perluasan jangkauan pelayanan IB).
2. Perbaikan manajemen pakan. Pengembangan pakan berbasis local.
3. Introduksi teknologi pakan (silase, fermentasi)
4. Penguatan layanan kesehatan hewan (pemeriksaan rutin kesehatan reproduksi, vaksinasi dan pengobatan penyakit, penanganan gangguan reproduksi secara cepat).
5. Peningkatan kapasitas peternak (pelatihan deteksi birahi, edukasi manajemen reproduksi dan kelahiran, pendampingan intensif oleh penyuluh).
6. Penerapan recording dan monitoring (pencatatan siklus reproduksi ternak, monitoring kebuntingan dan kelahiran, evaluasi kinerja IB secara berkala).
7. Penanganan kelahiran dan pedet (pendampingan saat partus (kelahiran), pemberian kolostrum tepat waktu, perawatan pedet untuk menekan kematian.

f. Persentase Penanganan Penyakit Hewan

Persentase penanganan penyakit hewan merupakan salah satu indikator untuk mengukur fungsi kesehatan hewan. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan dan penanggulangan penyakit hewan, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.

Penyakit hewan merupakan semua penyakit yang dapat menjangkiti hewan. Penyakit hewan meliputi penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang dapat menular ke manusia (zoonosis).

Persentase penanganan penyakit hewan menular adalah persentase jumlah penanganan kasus penyakit hewan oleh pusat kesehatan hewan (puskeswan) dan petugas kesehatan hewan dibagi jumlah pelaporan kasus penyakit hewan dikalikan 100 %.

Pada tahun 2026 penyakit yang sering terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain: PMK, Scabies, Rhunitis,avitaminosis, abses, arthritis, enteritis dan lain-lain . Sampai dengan triwulan II Tahun 2026 total terdapat 503 laporan kasus dan yang tertangani 485 kasus. Sehingga presentasi yang telah tertangani sebanyak 96,42%.

Tabel 2. 29
Realisasi Persentase Penanganan penyakit Hewan
Tahun 2021-2026 TW II

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Penanganan penyakit Hewan	96,68	100	97,26	97,43	99,44	96,42

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2026 triwulan II sebesar 96,42% sudah melebih target yang ditetapkan yaitu 86%. Faktor pendorong pencapaian target kinerja diantaranya kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan, ketersediaan obat -obatan dan peralatan medis, pelaksanaan program vaksinasi dan pengendalian penyakit secara rutin yang mampu menekan angka kejadian penyakit dan mempercepat penanganan ketika terjadi kasus, meningkatnya kesadaran peternak dalam melaporkan kasus penyakit, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini dan mencegah penyebaran lebih luas, kebijakan pemerintah daerah yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan secara berkelanjutan dan terencana..

Faktor penghambat keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan hewan yang menyebabkan keterlambatan penanganan kasus, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kurangnya ketersediaan obat, vaksin, maupun fasilitas pelayanan

yang belum merata, rendahnya tingkat pelaporan dari peternak (akibat kurangnya pengetahuan atau kesadaran terhadap pentingnya penanganan dini penyakit), **luasnya** wilayah layanan dan sebaran ternak yang menyulitkan jangkauan pelayanan secara cepat dan merata, potensi munculnya penyakit menular dan zoonosis yang memerlukan penanganan khusus dan sumber daya lebih besar sehingga dapat mempengaruhi capaian indikator secara keseluruhan.

Upaya pencapaian target melalui peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga kesehatan hewan, melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta optimalisasi peran paramedik veteriner di lapangan, penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan termasuk penyediaan obat-obatan, vaksin, serta pengembangan fasilitas pelayanan seperti puskeswan, peningkatan kegiatan preventif dan promotif seperti vaksinasi massal, surveilans penyakit, dan sosialisasi kepada peternak, pemanfaatan sistem pelaporan dan monitoring berbasis teknologi, untuk mempercepat deteksi dan respons terhadap kasus penyakit, peningkatan peran serta masyarakat/peternak, melalui penyuluhan dan pendampingan agar lebih aktif dalam melaporkan dan menangani kasus penyakit, penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dalam penanganan penyakit zoonosis yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Tabel 2.30.
Rekapitulasi Data Penyakit Hewan Tahun 2026 Triwulan II

NO	Nama Penyakit /Jenis Pemeriksaan	Jenis Hewan							Keterangan
		Anjing	Domba/ Kambing	Kucing	Sapi	Unggas	Lainnya	Jumlah	
1	Abses	1	0	10	0	0	0	6	
2	Arthritis	0	0	3	4	0	0	6	
3	Avitaminosis	1	1	1	15	0	0	18	
4	Calicivirus	0	0	1	0	0	0	1	
5	Dematophitosis	0	0	10	0	0	0	5	
6	Enteritis	0	0	19	5	0	1	13	
7	FLUTD	0	0	9	0	0	0	4	
8	Febris	0	0	14	0	0	0	5	
9	Gastritis	1	0	7	0	0	0	8	
10	Hepatitis	0	0	3	0	0	0	1	
11	Investasi Parasit	5	0	1	0	0	0	4	

NO	Nama Penyakit /Jenis Pemeriksaan	Jenis Hewan							Keterangan
		Anjing	Domba/ Kambing	Kucing	Sapi	Unggas	Lainnya	Jumlah	
12	Konstipasi	0	0	3	0	0	0	2	
13	Orchitis	0	0	0	0	0	1	1	
14	Otitis	0	0	6	0	0	0	6	
15	Otitis Externa	0	0	9	0	0	0	5	
16	Pemeriksaaan Kebuntingan	0	5	7	0	0	0	6	
17	Rhinitis	0	0	50	3	0	0	31	
18	Rhinothracheitis	0	0	2	0	0	0	2	
19	Scabies	2	0	94	4	0	0	42	
20	Suspect Panleukopenia	0	0	1	0	0	0	1	
21	Vaksinasi Rabies	2	0	3	0	0	0	2	
22	Vulnus	1	0	12	1	0	0	8	
23	PMK	0	0	0	42	0	0	42	
24	BEF	0	0	0	9	0	0	9	
25	Cacingan	1	0	2	2	0	0	2	
26	Kekurangan Kalsium	0	0	0	3	0	0	3	
27	Keracunan	0	0	4	0	0	0	1	
28	Mastitis	0	0	0	1	0	0	1	
29	Retensio secundinarum	0	2	0	0	0	0	2	
30	Theileriosis	0	0	0	2	0	0	2	
31	Tympany	0	0	0	2	0	0	2	
32	Anemia	0	0	1	0	0	0	1	
33	Distokia	0	0	2	0	0	0	1	
34	Enterotoksemia	0	2	0	0	0	0	2	
35	Prolaps Ani	0	0	2	0	0	0	1	
36	Coccidiosis	2	0	0	0	0	0	0	
37	Keguguran	0	0	1	0	0	0	0	
38	Konjungtivitis	0	0	2	0	0	0	0	
39	Newcastle disease	0	0	0	0	2	0	0	
40	FIP	0	0	1	0	0	0	0	
41	Prolaps vagina	0	0	1	0	0	0	0	
42	Pyometra	0	0	1	0	0	0	0	

NO	Nama Penyakit /Jenis Pemeriksaan	Jenis Hewan							Keterangan
		Anjing	Domba/ Kambing	Kucing	Sapi	Unggas	Lainnya	Jumlah	
43	Fraktur	0	0	0	0	1	0	0	
44	Chlamydophila felis			1					
45	Metritis			1					
Total Jumlah Kasus		**16**	**10**	**284**	**93**	**3**	**2**	**503**	
Jumlah yang tertangani		**485**							
Presentase Kasus yang tertangani		**96,42**							
Presentase Kasus yang tidak tertangani		**3,58**							

g. Persentase peningkatan pengawasan produk olahan asal hewan dan bahan asal hewan yang memenuhi syarat.

Indikator Persentase Peningkatan Pengawasan Produk Olahan Asal Hewan dan Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Syarat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan produk pangan asal hewan yang beredar di masyarakat. Indikator ini menjadi sangat strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen, kesehatan masyarakat, serta kepercayaan terhadap produk pangan lokal.

Indikator ini juga merupakan salah satu pelaksanaan fungsi kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). Kesmavet merupakan rantai penghubung antara kesehatn hewan dan produk hewan, kesehatan manusia serta kesehtan lingkungan. Kesmavet sebagai salah satu unsur dari urusan kesehatan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia melalui hewan dan/atau produk hewan adalah penyakit hewan yang masuk dalam kategori zoonosis.

Produk hewan adalah segala macam bahan yang didapatkan dari tubuh hewan seperti daging, lemak, darah, susu, telur, enzim, dan sebagainya.

Bahan asal hewan (disingkat BAH) adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut, termasuk diantaranya daging, susu, telur, bulu, tanduk, kulit, tulang, dan

mani.

Pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan bertujuan untuk menjamin kesehatan produk hewan dan bahan asal hewan sehingga terbebas dari penyakit yang dapat ditularkan melalui produk hewan/*food borne disease*.

Tabel 2.31
Realisasi Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat
Tahun 2021-2026 TW II

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	82,96	100	82,1	82,41	79,75	77,76

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja pengawasan produk hewan tahun 2026 triwulan II sebesar sebesar 77,76% dengan target yang ditetapkan sebesar 76%, sehingga kinerja sudah melampaui target. Capaian indikator ini menunjukkan sejauh mana kegiatan pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelaku usaha mampu meningkatkan jumlah produk yang memenuhi standar keamanan pangan, seperti bebas dari bahan berbahaya, memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, serta memiliki izin edar yang sah.

Penjaminan produk hewan dapat dilakukan melalui pengaturan peredaran produk hewan dengan kegiatan melalui pengawasan, pemeriksaan dan pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi, untuk menjamin keamanan produk hewan sejak dalam proses budidaya hingga peredaran (*safe from farm to tabel*).

Penjaminan higiene dan sanitasi adalah persyaratan dasar sistem jaminan keamanan pangan. Penjaminan higiene dan sanitasi dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan (*food borne disease*) atau menggunakan produk hewan dengan mengendalikan resiko produk hewan dalam proses produksi tercemar atau terkontaminasi oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik, serta resiko produk hewan yang tidak halal bagi yang dipersyaratkan.

Pengawasan dilakukan melalui pengambilan sampel yang dilakukan secara uji petik (karena keterbatasan anggaran). Ke

depan perlu perencanaan dan pendanaan yang memadai jika ingin mewujudkan peta penyakit hewan yang ideal dengan sampling di 20 kecamatan secara merata untuk mengetahui keASUHAN (Aman, sehat, Utuh dan Halal) dari bahan pangan asal hewan. Hasil pemeriksaan sampel organ hati sapi terhadap keberadaan cacing hati di Rumah Potong Hewan (RPH) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32
Sampel Organ Hati

Lokasi	Jenis Sampel	Jumlah	Hasil Pemeriksaan	
			Cacing Hati	Penyakit Lainnya
RPH Temanggung	Hati	849	215	78
RPH Parakan	Hati	194	17	50
Total	Hati	1043	232	128

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung

Hasil pemeriksaan postmortem/setelah dipotong yang dilakukan di RPH Parakan dan Temanggung pada Triwulan II Tahun 2026 terhadap sampel organ hatinya adalah dari total pemotongan sebanyak 1.043 ekor, hasil pemeriksaan hatinya ditemukan sebanyak 232 buah ditemukan kasus cacing hati. Persentase kasus cacing hati dari sapi yang dipotong di RPH adalah 22.24%. Sedangkan presentase kasus penyakit lainnya sebanyak 12.27%.

Presentase produk hewan yang memenuhi syarat sebanyak 77.76%. Hati yang mengandung cacing hati diafkir dan tidak boleh dikonsumsi karena bisa membahayakan kesehatan.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan capaian indikator antara lain intensitas pengawasan yang semakin meningkat, ketersediaan tenaga pengawas yang kompete seperti petugas veteriner dan pengawas keamanan pangan yang memiliki kapasitas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian, peningkatan kesadaran pelaku usaha seiring dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait higiene, sanitasi, serta standar keamanan pangan.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pencapaian indikator antara lain keterbatasan jumlah dan jangkauan petugas pengawas, sehingga belum seluruh wilayah dan pelaku usaha dapat terpantau secara optimal, masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terutama skala kecil dan rumah tangga,

terhadap standar keamanan pangan. keterbatasan sarana dan prasarana pengujian termasuk fasilitas laboratorium yang belum merata dan keterbatasan alat uji cepat di lapangan, tingginya peredaran produk tanpa izin edar (terutama di pasar tradisional yang sulit dikendalikan secara menyeluruh), kurangnya kesadaran konsumen yang masih membeli produk tanpa memperhatikan aspek keamanan dan kelayakan.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator, dilakukan berbagai upaya strategis, antara lain peningkatan intensitas dan cakupan pengawasan, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas pengawas, penguatan sarana dan prasarana pengujian termasuk penyediaan alat uji cepat (rapid test) dan peningkatan kapasitas laboratorium, pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait penerapan higiene sanitasi, Good Manufacturing Practices (GMP), dan perizinan usaha, edukasi kepada masyarakat/ konsumen agar lebih selektif dalam memilih produk yang aman dan layak konsumsi, penguatan koordinasi lintas sektor, dengan instansi terkait dalam pengawasan pangan asal hewan secara terpadu.

h. Persentase Prasarana Pertanian yang dimanfaatkan sesuai fungsinya

Prasarana pertanian adalah infrastruktur pendukung yang merupakan penunjang utama terselenggaranya kegiatan pertanian. Salah satunya dengan fasilitasi pengembangan sumber-sumber air dengan pembangunan jaringan irigasi usaha tani yang bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.

Tabel 2.33.
Realisasi Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya
Tahun 2026 Triwulan II

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	na	na	na	100	100	100

Realisasi kinerja indikator ini masih menggunakan data Tahun 2025 sebesar 100%, karena kegiatannya masih dalam

proses Pembangunan.. Prasarana pertanian disini adalah kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian (sumber-sumber air) yang selama ini dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal dan berfungsi dengan baik. Di tahun 2024 sebanyak 70 unit telah dibangun dan dimanfaatkan oleh Masyarakat berupa sumur tanah dangkal/dalam, RJIT, Irigasi perpompaan, Irigasi Perpipaan dan irigasi springkle dari semua sumber anggaran. Tahun anggaran 2025 ini terdampak efisiensi anggaran pusat sehingga dana DAK untuk sarana dan prasaranya 0. Akan tetapi masih terdapat 15 unit pembangunan sarana dan prasarana yang didanai baik dari dana DBHCHT dan APBN seperti rincian sebagai berikut:

Tabel 2.34
Data Rekapitulasi Bantuan Prasarana Irigasi Usaha Tani
Tahun 2025

No.	NAMA KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	KET
	Irigasi Air Tanah dalam		
1	KT Banjarsari Ngadirejo	DBHCHT APBD II	
2	KT Kertosari Jumo	DBHCHT APBD II	
3	KT Losari Tlogomulyo	DBHCHT APBD II	
4	KT Kataan Ngadirejo	DBHCHT APBD II	
	EMBUNG PERTANIAN		
1	KT Wonosari Bulu	DBHCHT APBD II	
2	KT Tuksari Kledung	DBHCHT APBD II	
3	KT Tlahab Kledung	DBHCHT APBD II	
4	KT Pagersari Tlogomulyo	DBHCHT APBD II	
	RJIT		
1	KT Tegalurung Bulu	DBHCHT APBD I	
2	KT Sukomarto Jumo	DBHCHT APBD I	
3	KT Botoputih Tembarak	DBHCHT APBD I	
4	KT Medari Ngadirejo	DBHCHT APBD I	
	Irigasi Perpompaan APBN		
1	KT Lambang Bibit Gondang Wayang Kedu	APBN	
2	KT Sri Sadono Mergowati Kedu	APBN	
3	KT Rukun Sentoso Pendowo Kranggan	APBN	

Faktor Pendorong indikator tersebut adalah program pemerintah untuk swasembada pangan membutuhkan pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian,

Faktor Penghambat Indikator tersebut

1) Jaringan sekunder yang rusak (kewenangan DPUPR)
2) Manajemen pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak terencana (Kurangnya kesadaran masyrakat untuk pemeliharaan/mengelola asset jaringan secara swadaya)
3) Perubahan iklim (hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan debit air tidak sesuai dengan kemampuan kapasitas sarana irigasi untuk menapung air),
4) Sampah yang dibuang di badan air,
5) Prasarana pertanian yang dibangun tidak sesuai dengan kriteria dan kondisi dilapangan
6) Kurangnya ketersediaan air permukaan khususnya untuk irigasi perpompaan

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut

1. Koordinasi dengan instansi sesuai dengan kewenangannya (yang menangani jaringan sekunder dan persampahan),
2. Pendampingan kelompok dalam pemeliharaan dan pengelolaan asset
3. Pembangunan prasarana pertanian sesuai kriteria teknis dan kondisi di lapangan
4. Verifikasi administrasi dan lapangan
5. Larangan membuang sampah di saluran irigasi

i. Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian

Indikator persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian serta meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh berbagai risiko bencana pertanian. Pada indikator ini dititik beratkan pada bencana pertanian berupa serangan organisme pengganggu tanaman, perubahan iklim yang berpotensi menurunkan produktivitas dan pendapatan petani. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan, pengendalian, serta penanganan dampak bencana pertanian secara cepat dan terkoordinasi.

Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan dan dukungan pemerintah kepada petani atau kelompok tani dalam melakukan pengendalian terhadap potensi maupun kejadian bencana pertanian. Fasilitasi tersebut dapat berupa penyediaan

sarana pengendalian, pendampingan teknis, kegiatan monitoring dan pengamatan lapangan, serta pemberian rekomendasi teknis dalam penanganan bencana pertanian..

Indikator persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian dihitung dari Jumlah Luasan yang tertangani melalui gerakan pengendalian OPT di bagi Luas yang terpapar yang terlaporkan x 100%

Tabel 2.35.
Realisasi Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian
Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	41,2 (100%)	41,45 (100%)	40,62 (100%)	99,23 (100%)	94,32 (100%)	98.9

Tahun 2026 triwulan II luas cakupan pengendalian 160 ha dari total luas hamparan lokasi yang terpapar seluas 161.8 hektar (berdasarkan laporan yang masuk), sehingga persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian sebesar 98,8% sementara target yang ditetapkan sbesar 78%, artinya capaian kinerja sudah terlampaui. Gerakan pengendalian dilakukan secara swadaya, kerjasama dengan kelompok dan kerjasama dengan laboratorium hama provinsi.

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memberikan dukungan kepada petani dalam mengantisipasi dan mengendalikan dampak bencana pertanian sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat ditekan. Melalui fasilitasi yang dilakukan, petani memperoleh akses terhadap informasi teknis, sarana pengendalian, serta pendampingan dalam menerapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas produksi pertanian serta meningkatkan ketahanan usaha tani terhadap berbagai risiko bencana.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja ini adalah melaksanakan pengendalian serangan OPT baik secara fisik/mekanik, biologis, penyuluhan tentang pengendalian hama penyakit tanaman, pengamatan dini terhadap setrangan OPT dilakukan secara teratur sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, gerakan pengendalian hama penyakit

semua komoditas pertanian dilakukan secara swadaya serta kolaborasi kelompok tani, laboratorium hama penyakit tanaman Kedu, POPT dan PPL, fasilitasi bantuan sarpras pengendalian OPT kepada kelompok, fasilitasi AUTP (asuransi usaha tani padi), pelatihan pembuatan pestisida nabati dan ramah lingkungan, mitigasi pengendalian OPT, perbanyakan APH- Refugia, Gerakan pembuatan rumah burung hantu.

Pengendalian bencana pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pendorongnya antara lain keberadaan sistem peringatan dini yang mampu membantu petani mengantisipasi potensi bencana, serta pemanfaatan teknologi untuk memantau kondisi lahan secara lebih akurat. Pengembangan varietas tanaman tahan bencana, penerapan praktik pertanian yang baik, serta kerja sama antara petani, pemerintah, dan stakeholder turut memperkuat ketahanan sektor pertanian. Dukungan infrastruktur pertanian yang memadai serta pendidikan dan pelatihan bagi petani juga berperan dalam meningkatkan kemampuan menghadapi bencana.

Di sisi lain, pengendalian bencana pertanian masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya informasi potensi bencana, dan infrastruktur yang belum memadai. Tingginya ketergantungan pada kondisi alam serta kurangnya koordinasi antar pihak juga mengurangi efektivitas penanganan bencana. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar serta dampak perubahan iklim yang meningkatkan intensitas bencana semakin menambah tantangan di lapangan.

Untuk meningkatkan capaian fasilitasi pengendalian bencana pertanian, diperlukan berbagai upaya strategis, antara lain pengembangan sistem peringatan dini yang lebih efektif, pemanfaatan teknologi pemantauan, dan pengembangan varietas tanaman tahan bencana. Penerapan praktik pertanian yang baik, pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan, serta peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan menjadi langkah penting yang harus diperkuat. Kerja sama antara petani, pemerintah, dan stakeholder perlu terus didorong, termasuk pengembangan asuransi pertanian sebagai perlindungan ekonomi bagi petani dalam menghadapi risiko bencana. Dengan langkah-

langkah tersebut, pengendalian bencana pertanian diharapkan semakin optimal dan mampu mendukung keberlanjutan produksi pertanian.

j. Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi

Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat adopsi teknologi pertanian oleh kelompok tani dalam suatu wilayah. Teknologi yang dimaksud dapat berupa teknologi budidaya, penggunaan varietas unggul, pengelolaan hama dan penyakit tanaman, teknologi pemupukan berimbang, serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi oleh kelompok tani, maka semakin besar peluang peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, serta kemampuan petani dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian. Realisasi Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologiTahun 2026, masih menggunakan data 2025 karena perhitungan dilakukan 1 kali dalam setahun pada bulan November.

Tabel 2.36.

Realisasi Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi

Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	na	na	na	na	61,88	61,88

Faktor pendorong tercapainya target kinerja antara lain:

1. Peran aktif penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan, pembinaan, dan transfer teknologi kepada kelompok tani,
2. Adanya dukungan kebijakan dan program pemerintah dalam penguatan sistem penyuluhan pertanian,
3. Ketersediaan kelompok tani sebagai kelembagaan petani yang menjadi sasaran utama kegiatan penyuluhan,
4. Meningkatnya kesadaran petani terhadap pentingnya inovasi teknologi pertanian dalam meningkatkan produktivitas usaha tani.

Rendahnya persentase kelompok tani yang telah menggunakan teknologi dipengaruhi oleh beberapa kendala utama, baik dari aspek sumber daya manusia, ekonomi, maupun kelembagaan, diantaranya

1. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani terhadap teknologi pertanian. Sebagian besar petani, khususnya pada kelompok usia lanjut, masih terbiasa dengan metode konvensional dan belum sepenuhnya memahami manfaat serta cara penggunaan teknologi modern.
2. Keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana teknologi. Alat dan mesin pertanian (alsintan), teknologi digital pertanian, maupun inovasi lainnya belum merata distribusinya.
3. Keterbatasan permodalan kelompok tani. Adopsi teknologi umumnya memerlukan biaya yang relatif besar, sehingga kelompok tani dengan kapasitas ekonomi rendah cenderung enggan atau belum mampu mengadopsi teknologi tersebut.
4. Minimnya pendampingan dan penyuluhan. Intensitas penyuluhan yang belum optimal menyebabkan proses transfer teknologi berjalan lambat, sehingga adopsi inovasi di tingkat kelompok tani tidak berkembang secara signifikan
5. Rendahnya kelembagaan kelompok tani. Kelompok tani yang belum aktif atau belum memiliki manajemen organisasi yang baik cenderung kurang responsif terhadap inovasi dan program pemerintah.
6. Keterbatasan jaringan informasi dan akses digital. Pemanfaatan teknologi berbasis digital masih terkendala oleh keterbatasan akses internet serta rendahnya literasi digital di kalangan petani.

Adapun upaya tindaklanjut yang perlu dilakukan adalah

1. Peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan dan pelatihan. Kegiatan ini difokuskan pada pengenalan dan praktik langsung penggunaan teknologi pertanian, baik alsintan, teknologi budidaya, maupun digital farming, sehingga petani tidak hanya memahami tetapi juga mampu mengaplikasikan teknologi secara mandiri.
2. Penguatan peran penyuluh pertanian melalui peningkatan intensitas pendampingan di lapangan. Penyuluh diharapkan menjadi penghubung antara inovasi teknologi dengan petani,

serta memastikan proses adopsi berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

3. Penyediaan dan fasilitasi akses terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan). Pemerintah dapat memberikan bantuan, hibah, maupun skema pemanfaatan bersama (brigade alsintan) agar kelompok tani dapat menggunakan teknologi tanpa harus menanggung biaya besar secara individu.
4. Pengembangan demplot (demonstration plot) dan percontohan teknologi. Keberadaan lahan percontohan yang berhasil akan meningkatkan kepercayaan petani terhadap teknologi baru dan mempercepat proses adopsi.
5. Penguatan kelembagaan kelompok tani. Peningkatan kapasitas organisasi, manajemen kelompok, serta revitalisasi kelompok tani yang kurang aktif akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih terbuka terhadap inovasi.
6. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital pertanian. Termasuk penggunaan aplikasi pertanian, sistem informasi pasar, dan platform digital lainnya, disertai peningkatan literasi digital bagi petani.
7. Penguatan kemitraan dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat diseminasi inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

k. Persentase kelompok tani yang naik kelas

Indikator Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas menggambarkan tingkat perkembangan dan kemandirian kelembagaan petani dari kelas pemula menuju madya, dan dari madya menuju utama. Kenaikan kelas kelompok tani mencerminkan peningkatan kapasitas organisasi, kemampuan manajerial, akses terhadap sumber daya, serta penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Dengan demikian, indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani oleh pemerintah daerah. Capaian indikator ini menunjukkan sejauh mana kelompok tani mampu berkembang menjadi kelembagaan ekonomi yang lebih kuat, profesional, dan berorientasi pasar. Semakin tinggi persentase kelompok tani yang naik kelas, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia petani serta daya saing sektor

pertanian di daerah.

Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan petani belum sepenuhnya tergolong dalam kolompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, mulai dari non kelas/awal, pemula, lanjut, madya dan utama, namun sebagian besar belum berbadan hukum.

Tahapan Kelas Kelompok Tani

Pemula : Baru terbentuk, masih belajar organisasi.

Lanjut : Sudah ada kegiatan usaha tani bersama.

Madya : Mampu mengelola usaha tani secara kolektif, mulai orientasi pasar.

Utama : Mandiri, berbasis agribisnis, mampu bermitra dan berkontribusi pada ekspor.

Tahun 2026 Triwulan I data realisasi masih menggunakan data 2025, karena penilaian kelas kelompok dilaksanakan 1 Tahun sekali di bulan November. Data kelompokm yang naik kelas sebanyak 45 kelompok (1,4%) dari total kelompok tani yang terdaftar 3205 (2737 kelompok tani, 468 KWT) yang naik kelas, dengan data capaian dapat di lihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.38
Realisasi Persentase kelompok tani yang naik kelas
Tahun 2021- 2026

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,81	1,03	0,98	1,4	1,4	1,4

Tabel 2.39.
Jumlah Kelompok tani yang naik kelas Tahun 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	jumlah kelompok tani yang naik kelas	22	28	40	45	45	45

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kualitas kelompok tani diantaranya adalah :

1. Intensitas pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian yang berkelanjutan, sehingga kelompok tani mendapatkan arahan dalam pengelolaan organisasi dan usaha tani.
2. Akses terhadap program pemerintah, seperti bantuan sarana produksi, alsintan, serta kegiatan pelatihan yang mendukung peningkatan kapasitas kelompok.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang aktif dan inovatif dalam kelompok tani, terutama pengurus yang memiliki komitmen dan kemampuan manajerial.
4. Penerapan teknologi pertanian dan inovasi usaha tani, yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.
5. Terjalinnya kemitraan usaha, baik dengan pelaku usaha, koperasi, maupun lembaga keuangan, yang memperkuat posisi kelompok tani dalam rantai pasar.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menghambat kenaikan kelas kelompok tani, antara lain:

1. Rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani, seperti lemahnya manajemen organisasi, administrasi, dan kepemimpinan.
2. Kurangnya partisipasi anggota kelompok, sehingga kegiatan kelompok tidak berjalan optimal dan cenderung pasif.
3. Terbatasnya akses terhadap permodalan dan pasar, yang menghambat pengembangan usaha kelompok tani.
4. Minimnya inovasi dan adopsi teknologi, sehingga produktivitas dan nilai tambah usaha tani tidak mengalami peningkatan signifikan.
5. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, tanpa diimbangi dengan kemandirian usaha kelompok.
6. Belum optimalnya pendampingan penyuluh, baik dari sisi jumlah maupun intensitas kunjungan di lapangan.

Dalam rangka meningkatkan persentase kelompok tani yang naik kelas, dilakukan berbagai upaya strategis sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani, melalui pelatihan manajemen organisasi, administrasi, dan kepemimpinan kelompok.

2. Peningkatan intensitas pendampingan oleh penyuluh pertanian, dengan fokus pada pengembangan usaha dan peningkatan kinerja kelompok.
3. Fasilitasi akses permodalan dan pembiayaan, seperti kredit usaha rakyat (kur) dan kemitraan dengan lembaga keuangan.
4. Pengembangan usaha agribisnis kelompok tani, agar tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada pengolahan dan pemasaran hasil.
5. Mendorong penerapan inovasi dan teknologi pertanian, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.
6. Penerapan sistem penilaian dan monitoring kelas kelompok tani secara berkala, untuk memastikan progres perkembangan kelompok secara terukur.

Kenaikan kelas kelompok tani bukan sekadar formalitas, tetapi proses pembinaan berkelanjutan: mulai dari legalitas, peningkatan kapasitas, penerapan teknologi, hingga penguatan usaha berbasis agribisnis. Dengan dukungan pemerintah dan akses pasar, kelompok tani dapat berkembang dari pemula menjadi utama, sehingga berkontribusi pada swasembada pangan

B. INDIKATOR SPM

DKPPP tidak terdapat indikator yang berkaitan dengan SPM

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator kinerja kunci ditetapkan oleh Kementerian dalam negeri dan tiap tahun ada update (berubah), sehingga indikator kinerja kunci yang telah tercantum dalam dokumen Renstra akan berbeda dengan laporan capaian indikator kinerja kunci tahunan Kementerian dalam negeri. Dalam dokumen ini indikator kinerja kunci yang tercantum adalah indikator kinerja kunci sesuai dengan Resntra 2025-2029.

- Persentase Cadangan Pangan, adalah indikator yang dapat menggambarkan persentase cadangan pangan Kabupaten/kota.
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : *one data* KKP) adalah indikator yang mengukur Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten dengan sumber data utama menggunakan *One Data* KKP dalam satuan ton yang di bagi dengan Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang

direncanakan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satuan ton.

- Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, adalah jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya adalah Jumlah keseluruhan kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun pelaporan dikurangi jumlah keseluruhan penyakit sebelumnya, dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun (t-1)
- Persentase kinerja realisasi pupuk, adalah Keseluruhan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/perorangan petani, dibagi rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik.
- Produktivitas pertanian per hektar per tahun, adalah Jumlah hasil produksi tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang dalam satuan per hektar, dibagi dengan Luas tanaman pangan dan perkebunan yang dapat dipanen dalam satuan hektar.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dari 35 indikator terdapat 16 indikator yang belum mencapai target 100 %, karena data yang ditampilkan adalah capaian TW I sementara indikator dihitung secara tahunan antara lain:
   - Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (Prevalence of Undernourishment), masih menggunakan data tahun 2025 karena data terbaru dari BPS belum rilis. Dari 12 indikator untuk perhitungan PoU ada 3 indikator yang kategori merah (jumlah cadangan pangan, konsumsi protein dan NCPR)

- Indikator Indeks Ketahanan Pangan, dihitung berdasarkan data FSVA nasional dan masih menggunakan data tahun 2025 karena data terbaru dari BPS belum rilis. Untuk mengukur indikator ini data yang digunakan yang lintas urusan, sehingga perlu komitmen dan upaya bersama supaya target IKP dapat tercapai
- Indikator Skor Pola Pangan Harapan, masih menggunakan data tahun 2025 karena data terbaru dari BPS belum rilis.
- Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah, masih menggunakan angka 2025 karena penilaian AKIP 2026 masih dalam proses evaluasi oleh evaluastor kabupaten.
- Indikator Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar, hal ini disebabkan terbatasnya pemahaman dan kesadaran sebagian pelaku usaha pangan, khususnya pada skala kecil, terhadap standar keamanan pangan dan cara penanganan pangan segar yang baik
- Indikator Angka Konsumsi Ikan masih menggunakan data tahun 2025 karena data terbaru dari BPS belum rilis.
- Indikator jumlah produksi perikanan tangkap, karena penghitungan dilakukan secara tahunan.
- Indikator jumlah produksi perikanan budidaya, karena penghitungan dilakukan secara tahunan
- Indikator jumlah produksi pengolahan ikan, karena penghitungan dilakukan secara tahunan.
- Indikator produktivitas padi karena penghitungan dilakukan secara tahunan.
- Indikator produktivitas jagung karena penghitungan dilakukan secara tahunan.
- Indikator jumlah produksi daging ternak besar karena penghitungan dilakukan secara tahunan.
- Indikator jumlah produksi daging ternak kecil karena penghitungan dilakukan secara tahunan.
- Indikator jumlah produksi ternak unggas karena penghitungan dilakukan secara tahunan.
- Indikator jumlah produksi telur karena penghitungan dilakukan secara tahunan.
- Indikator persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama, masih menggunakan capaian tahun 2025 karena di TW I masih dala proses verifikasi dan pengajuan usulan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi DKPPP diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kesejahteraan Petani, Peternak Dan Pelaku Usaha Perikanan Masih Rendah	Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Masih Rendah	Masih Adanya Potensi Kerawanan Pangan
		Ketersediaan Pangan Pokok Fluktuatif
		Kurangnya penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, GAP (Good Agriculture Practice), GMP (Good Manufacturing Practice), GHP (Good Handling practice), GBP (Good Breeding Practice), GFP (Good Farming Practice) di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam budidaya pertanian
		Rendahnya penyediaan dan pemanfaatan prasarana pertanian
		Perubahan Iklim
		Adanya serangan hama penyakit yang belum tertangani
		Rasio jumlah PPL dan kelompok tani yang masih kurang
		Menurunnya daya dukung lingkungan
		Penerapan standar budidaya perikanan yang belum sesuai SOP, CBIB, CPIB di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan
		Ketersediaan ikan edemik di perairan umum kurang
		Fluktuasi harga saprodi pertanian dan perikanan
	Rendahnya mutu hasil pertanian dan perikanan	Mutu pangan segar asal tumbuhan yang belum memenuhi standart keamanan pangan
		Adanya penyakit hewan yang belum tertangani dan masih adanya produk dan bahan asal hewan yang belum memenuhi standart ASUH
		Budidaya pertanian dengan penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, HACCP (Hazard Analisis critical control point), GVP(Good veteryner practice) di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional.

   Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah antara lain

   - Terhambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian

     Rendahnya produktivitas, meningkatnya biaya produksi, serangan OPT/penyakit, fluktuasi harga sarana produksi dan belum optimalnya mutu produk menyebabkan pendapatan petani, peternak dan pelaku usaha perikanan belum meningkat secara optimal.
   - Ketahanan pangan daerah menjadi lebih rentan

Produksi yang rendah, ketersediaan pangan yang fluktuatif dan ancaman perubahan iklim dapat mengurangi kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau.

- Daya saing ekonomi daerah belum optimal
  Rendahnya produktivitas dan mutu produk menyebabkan nilai tambah komoditas pertanian, peternakan dan perikanan belum maksimal

Pada tingkat nasional, permasalahan tersebut berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya agenda peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi, penguatan ketahanan/swasembada pangan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, peningkatan produktivitas, mutu, efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Temanggung tidak hanya menjadi kepentingan daerah, tetapi juga merupakan bagian dari kontribusi daerah terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DKPPP, antara lain :

Tantangan	Peluang
Produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan belum optimal	Potensi sumber daya pertanian, peternakan dan perikanan yang besar
Perubahan iklim dan risiko bencana terhadap produksi	Tersedianya teknologi pertanian adaptif dan informasi iklim
Fluktuasi harga sarana produksi dan hasil pertanian	Peluang penguatan kelembagaan ekonomi dan kemitraan
Keterbatasan penyuluh dan tenaga teknis	Digitalisasi penyuluhan dan pelayanan
Penerapan standar budidaya dan keamanan pangan belum merata	Meningkatnya tuntutan konsumen terhadap produk yang aman dan bermutu
Kelembagaan kelompok tani/pelaku usaha belum seluruhnya kuat	Kelompok tani dan kelembagaan ekonomi dapat menjadi basis pemberdayaan
Keterbatasan sarana dan prasarana	Dukungan program pemerintah pusat/provinsi serta peluang kemitraan

Data sektoral belum sepenuhnya terintegrasi	Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem data sektoral
Permasalahan bersifat lintas sektor	Peluang kolaborasi dengan OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, desa dan masyarakat

5. Formulasi isu-isu penting

   Penanganan permasalahan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas, penguatan sarana dan prasarana produksi, peningkatan penerapan standar budidaya dan keamanan pangan, penguatan penyuluhan dan pendampingan, pengendalian hama dan penyakit, peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim, penguatan ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak dan pelaku usaha perikanan sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Temanggung terhadap pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.

6. Telaah Pokok Pikiran DPRD

   Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agar usulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User sekretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2. 41
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

BIDANG URUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPD TUJUAN	PROGRAM
Kelautan dan Perikanan			
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana perikanan	DKPPP	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Pertanian			
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana pertanian	DKPPP	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan prasarana pertanian	DKPPP	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, 2026

Jumlah usulan pokok pikiran Tahun 2027 sebanyak 145 usulan dengan nominal Rp 9.694.095.000, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah pokir yang diterima sebanyak 101 (Rp5.735.655.000)
b. Jumlah pokir yang tidak lolos sebanyak 44 (Rp 3.958.440.000), karena
   - Sudah mendapat bantuan tahun 2026
   - Kelompok tidak terdaftar
   - Usulan tidak memenuhi syarat (tidak sesuai dengan juknis)
   - Dobel usulan dengan aspirator yang berbeda
   - Nama penerima bantuan usulan tidak ada (hanya mencantumkan alamat)
   - Usulan bukan ranah DKPPP

2.4. *Review* terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD tidak ada penambahan sub kegiatan ataupun pagu (masih sesuai dengan pagu indikatif dari Bappeda)

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.42.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL 2027						ANALISA HASIL KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah**	**86,00**		**25.685.043.120**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah**	**86,00**		**25.685.043.120**
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	**74,90**					**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**74,90**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**1.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**1.500.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Temanggung				1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Temanggung				1.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**23.755.118.943**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**23.755.118.943**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	orang	23.755.118.943	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	orang	23.755.118.943
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**165.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**165.000.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	dokumen	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	dokumen	15.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	dokumen	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	dokumen	40.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	dokumen	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	dokumen	10.000.000

RANCANGAN AWAL 2027					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	dokumen	40.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	dokumen	60.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**53.500.000**
Pengadaan Mebel	Kab Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	unit	33.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	unit	20.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1.439.924.177**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	dokumen	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	dokumen	130.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	dokumen	1.308.424.177
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**270.000.000**

ANALISA HASIL KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	dokumen	40.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	dokumen	60.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**53.500.000**
Pengadaan Mebel	Kab Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	unit	33.500.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	unit	20.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**1.439.924.177**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	dokumen	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	dokumen	130.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	dokumen	1.308.424.177
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**270.000.000**

RANCANGAN AWAL 2027					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	unit	150.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	unit	20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	100.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**230.000.000**
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		**Persentase Ketersediaan Pangan Pokok**	**100**	**%**	**50.000.000**
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**50.000.000**
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1	unit	50.000.000
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia			-

ANALISA HASIL KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	unit	150.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	unit	20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	100.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					230.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		**Persentase Ketersediaan Pangan Pokok**	**100**	**%**	**50.000.000**
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					**50.000.000**
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1	unit	50.000.000
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia			-

RANCANGAN AWAL 2027							ANALISA HASIL KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**		**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		**Skor Pola Pangan Harapan**	**90.33**		**50.000.000**		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Skor Pola Pangan Harapan**	**90.33**		**50.000.000**
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					**50.000.000**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**					**50.000.000**
Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Kab Temanggung	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,00	kelompok	50.000.000		Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Kab Temanggung	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,00	kelompok	50.000.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		**Persentase penanganan kerawanan pangan**	**100**	**%**	**80.000.000**		**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Persentase penanganan kerawanan pangan**	**100**	**%**	**80.000.000**
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Kab Temanggung**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang disusun**			**20.000.000**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Kab Temanggung**	**Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang disusun**			**20.000.000**
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab Temanggung	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1	dokumen	20.000.000		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab Temanggung	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1	dokumen	20.000.000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab Temanggung**	**Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**60.000.000**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab Temanggung**	**Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**60.000.000**
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			60.000.000	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			60.000.000

RANCANGAN AWAL 2027					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		**Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar**	**100**	**%**	**50.000.000**
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			**50.000.000**
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	paket	50.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN					**145.750.000**
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**140.5**	**ton**	**-**
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					-
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			-
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**jumlah produksi perikanan budidaya**	**10.673,61**	**ton**	**105.750.000**

ANALISA HASIL KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		**Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar**	**100**	**%**	**50.000.000**
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**			**50.000.000**
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	paket	50.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN					**145.750.000**
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		**Jumlah produksi perikanan tangkap**	**140.5**	**ton**	**-**
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					-
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			-
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**jumlah produksi perikanan budidaya**	**10.673,61**	**ton**	**105.750.000**

RANCANGAN AWAL 2027							ANALISA HASIL KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**		**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas**			**50.000.000**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas**			**50.000.000**
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab Temanggung				50.000.000	#	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab Temanggung				50.000.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**			**55.750.000**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**			**55.750.000**
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			30.750.000		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			30.750.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	unit	25.000.000	1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	unit	25.000.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan**	**10**	**%**	**30.000.000**		**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan**	**10**	**%**	**30.000.000**
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**			**30.000.000**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**			**30.000.000**
Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab Temanggung	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			30.000.000	#	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab Temanggung	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			30.000.000

RANCANGAN AWAL 2027							ANALISA HASIL KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**Jumlah produksi pengolahan ikan**			**10.000.000**		**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Jumlah produksi pengolahan ikan**			**10.000.000**
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab Temanggung**	**Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**10.000.000**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab Temanggung**	**Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**10.000.000**
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	kegiatan	10.000.000	#	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	kegiatan	10.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**470.000.000**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**470.000.000**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		**Produktivitas Padi**	**6,17**	**ton/ha**	**300.000.000**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Produktivitas Padi**	**6,17**	**ton/ha**	**300.000.000**
		Produktivitas jagung	**5,60**	**ton/ha**	-				**Produktivitas jagung**	**5,60**	**ton/ha**	-
		Produktivitas bawang putih	**6,16**	**ton/ha**	-				**Produktivitas bawang putih**	**6,16**	**ton/ha**	-
		Produktivitas bawang merah	**7,11**	**ton/ha**	-				**Produktivitas bawang merah**	**7,11**	**ton/ha**	-
		Produktivitas cabai rawit	**7,02**	**ton/ha**	-				**Produktivitas cabai rawit**	**7,02**	**ton/ha**	-
		Produktivitas cabai keriting	**7,02**	**ton/ha**	-				**Produktivitas cabai keriting**	**7,02**	**ton/ha**	-
		Produktivitas tembakau	**0,65**	**ton/ha**	-				**Produktivitas tembakau**	**0,65**	**ton/ha**	-
		Produktivitas kopi robusta	**0,70**	**ton/ha**	-				**Produktivitas kopi robusta**	**0,70**	**ton/ha**	-
		Produktivitas kopi arabika	**0,42**	**ton/ha**	-				**Produktivitas kopi arabika**	**0,42**	**ton/ha**	-

RANCANGAN AWAL 2027					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
		Jumlah produksi daging ternak besar	**809.172**	**kg**	-
		jumlah produksi daging ternak kecil	**268.637**	**kg**	-
		jumlah produksi ternak unggas	**6.255.823**	**kg**	-
		jumlah produksi telur	**6.874.713**	**kg**	-
		Persentase kelahiran pedet	48	%	-
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	38,17	%	-
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		**Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**			**210.000.000**
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab Temanggung	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			200.000.000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab Temanggung	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			10.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**			**90.000.000**
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab Temanggung	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			65.000.000
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Kab Temanggung	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian			25.000.000

ANALISA HASIL KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
		Jumlah produksi daging ternak besar	**809.172**	**kg**	-
		jumlah produksi daging ternak kecil	**268.637**	**kg**	-
		jumlah produksi ternak unggas	**6.255.823**	**kg**	-
		jumlah produksi telur	**6.874.713**	**kg**	-
		Persentase kelahiran pedet	48	%	-
		Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	38,17	%	-
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		**Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**			**210.000.000**
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab Temanggung	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			200.000.000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab Temanggung	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			10.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**			**90.000.000**
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab Temanggung	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			65.000.000
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Kab Temanggung	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian			25.000.000

RANCANGAN AWAL 2027					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**Persentase Prasarana yang digunakan**	**100**	**%**	**120.000.000**
Pengembangan Prasarana Pertanian	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian**			**25.000.000**
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			25.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian**			**95.000.000**
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab Temanggung	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			10.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab Temanggung	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			60.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kab Temanggung	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1	unit	25.000.000

ANALISA HASIL KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		**Persentase Prasarana yang digunakan**	**100**	**%**	**120.000.000**
Pengembangan Prasarana Pertanian	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian**			**25.000.000**
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			25.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian**			**95.000.000**
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab Temanggung	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			10.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab Temanggung	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			60.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Kab Temanggung	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1	unit	25.000.000

RANCANGAN AWAL 2027					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		**Persentase penanganan penyakit hewan**	**87**		**-**
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	**77**		**-**
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Kab Temanggung**	**Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**			**150.000.000**
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			150.000.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**100.000.000**
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab Temanggung	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium			-
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab Temanggung	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1000	pelayanan	100.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		**Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian**	**81**		**-**
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian abupaten/Kota		**Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**			**50.000.000**

ANALISA HASIL KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		**Persentase penanganan penyakit hewan**	**87**		**-**
		Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	**77**		**-**
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Kab Temanggung**	**Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**			**150.000.000**
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			150.000.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab Temanggung**	**Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**100.000.000**
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab Temanggung	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium			-
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab Temanggung	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1000	pelayanan	100.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		**Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian**	**81**		**-**
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		**Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**			**50.000.000**

RANCANGAN AWAL 2027					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab Temanggung	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	150	ha	50.000.000
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab Temanggung	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			-
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		**Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi**	**58**		**50.000.000**
		Persentase Peningkatan kelas kelp tani	**1,30**		-
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		**Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**			50.000.000
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab Temanggung	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	kec	50.000.000
					26.530.793.120

ANALISA HASIL KEBUTUHAN					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi Output Kegiatan**	**Indikator**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab Temanggung	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	150	ha	50.000.000
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab Temanggung	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			-
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		**Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi**	**58**		**50.000.000**
		Persentase Peningkatan kelas kelp tani	**1,30**		-
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		**Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**			50.000.000
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab Temanggung	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	kec	50.000.000
					26.530.793.120

Sumber : DKPPP Kabupaten Temanggung, 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang. Untuk Tahun 2027 tidak ada usulan Program dan kegiatan masyrakat di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung

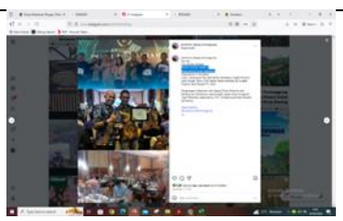
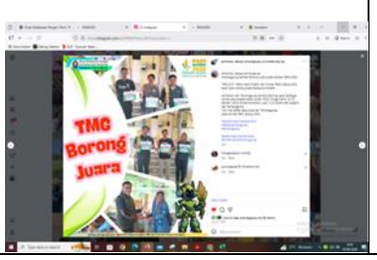
2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan bekerjasama dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi nasional) dalam pengembangan tanaman hortikultura komoditas Alpokat, cabai, Bawang Merah dan Bawang Putih untuk peningkatan produksi dan pelepasan varioes unggul lokal.

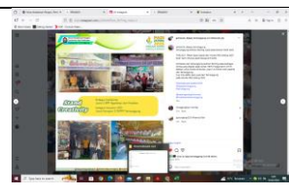
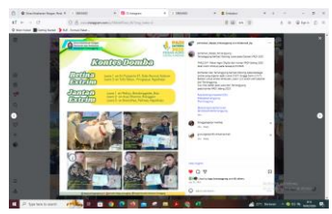
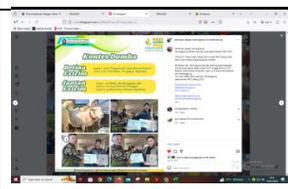
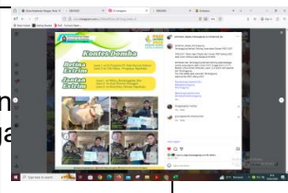
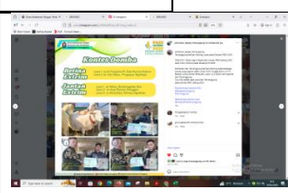
2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 18 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.43
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2026

No	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO	KETERANGAN
1	Juara 1 Kelompok Tani Komoditas Tembakau	Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jawa Tengah		Poktan Sindoro Makmur Desa Giripurno Kec. Ngadirejo
2	Kinerja Terbaik Pengelolaan Data Statistik Sektoral	BPS Kab. Temanggung		DKPPP Temanggung
3	Juara 1 Lembutan Sawah	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Muh Nuri Desa Ngipik Pringsurat, Temanggung

No	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO	KETERANGAN
4	Juara 2 Lembutan Sawah	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Darmanto Pringsurat, Temanggung
5	Juara 3 Lembutan Sawah	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Ashari, Morobungo, Jumo, Temanggung
6	Juara 1 Lembutan Tegal	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Arifin Desa Wonosari, Bulu, Temanggung
7	Juara 2 Lembutan Tegal	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Suryadi, Bansari, Bulu, Temanggung
8	Juara 3 Lembutan Tegal	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Setyo Bansari Bulu, Temanggung
9	Juara 1 Lembutan Gunung	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Yenas Renaldi, Wonosari Bulu, Temanggung
10	Juara 2 Lembutan Gunung	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Wahyu Tejo, Pagersari, Tlogomulyo, Temanggung
11	Juara 3 Lembutan Gunung	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Wahyu Tejo, Pagersari, Tlogomulyo, Temanggung

No	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	FOTO	KETERANGAN
12	Juara 2 Stand Creatifity Kategori Lembutan	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		BPP Ngadirejo
13	Juara 2 Kategori Inovator OPD	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		DKPPP Temanggung
14	Juara 1 Kontes domba Betina Extrim	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		Eri Pujiyanto KT Sido Muncul Kaloran
15	Juara 2 Kontes domba Betina Extrim	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		Tofa Setya Pringapus Ngadirejo
16	Juara 1 Kontes Domba Jantan Extreme	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Wahyu Bandunggede, Kedu
17	Juara 2 Kontes Domba Jantan Extreme	Dinas Pertanian dan Provinsi Jawa Tenga		an Arya Dharma Kranggan
18	Juara 3 Kontes Domba Jantan Extreme	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah		an Bramditya, Petirejo, Ngadirejo

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananKabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan secara nasional. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananKabupaten Temanggung guna mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan pangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DKPPP

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2025-2029 adalah “Terpenuhinya Kebutuhan Pangan” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan, meningkatnya produksi perikanan, meningkatnya produksi pertanian ”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKPPP, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananKab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananKabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	%	79.9	80.72
	Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	8.88	8.2
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	%	100	100
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	angka	90.33	90.93
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	%	100	100
	Meningkatnya produksi perikanan		Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22.41	22.64
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	140.5	141
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	10.673,61	10.678,41
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	ton	10	10
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan ikan	ton	395.76	395.76
	Meningkatnya produksi pertanian		Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22.3	22.2
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	Ton/ha	6,17	6.19
			Produktivitas jagung	Ton/ha	5,60	5.75
			Produktivitas bawang putih	Ton/ha	6,16	6.18

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
			Produktivitas bawang merah	Ton/ha	7,11	7.13
			Produktivitas cabai rawit	Ton/ha	7,02	7.04
			Produktivitas cabai keriting	Ton/ha	7,02	7.04
			Produktivitas tembakau	Ton/ha	0,645	0.65
			Produktivitas kopi robusta	Ton/ha	0,705	0,708
			Produktivitas kopi arabika	Ton/ha	0,415	0,425
			Jumlah produksi daging ternak besar	kg	809.172	812.214
			Jumlah produksi daging ternak kecil	kg	268.637	269.690
			Jumlah produksi ternak unggas	kg	6.255.823	6.280.872
			Jumlah produksi telur	kg	6.874.713	6.881.588
			Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	38,17	40.24
			Persentase kelahiran pedet	%	48	48
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan	%	100	100
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	%	87	89
			Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	77	79
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	81	87
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	%	58	58
			Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	1.3	1.3

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananKab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananTahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung Tahun 2027

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan						**40.043.454.559,00**								**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**25.915.043.120,00**								**0,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**25.915.043.120,00**								**0,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**25.685.043.120,00**								**0,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian						***25.644.293.120,00***								***0,00***	
		-						1.500.000,00						DKPPP		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	750.000,00							7 Dokumen	0,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	2 Dokumen	750.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.755.118.943,00						ASN lingkup DKPPP		0,00	
		-						23.755.118.943,00						ASN lingkup DKPPP		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	219 Orang/bulan		219 Orang/bulan	219 Orang/bulan	23.755.118.943,00							219 Orang/bulan	0,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						23.755.118.943,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	219 Orang/bulan		219 Orang/bulan	88 Orang/bulan	23.755.118.943,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					219 Orang/bulan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						185.000.000,00						ASN lingkup DKPPP		0,00	
		-						185.000.000,00						ASN lingkup DKPPP		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00							12 Laporan	0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	40.000.000,00							24 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	15.000.000,00							23 Paket	0,00	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					23 Paket	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan			0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											hijau, dan ekonomi biru		dan kesehatan				
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	12 Paket	40.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Paket	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						40.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						80.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						63.500.000,00						DKPPP		0,00	
		-						63.500.000,00						DKPPP		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	3 Unit	33.500.000,00							3 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	30.000.000,00							3 Unit	0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						33.500.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	5 Unit	33.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.403.924.177,00						DKPPP		0,00	
		-						1.403.924.177,00						DKPPP		0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.272.424.177,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00							12 Laporan	0,00	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						130.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan			0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											ekonomi hijau, dan ekonomi biru		pendidikan dan kesehatan				
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.272.424.177,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.272.424.177,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						276.000.000,00						DKPPP		0,00	
		-						276.000.000,00						DKPPP		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	100.000.000,00							8 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00							10 Unit	0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pajak dan Perizinannya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	26.000.000,00							10 Unit	0,00	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.000.000,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	122 Unit	150.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	26.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	4 Unit	100.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00						DKPPP		0,00	
		-						1.500.000,00						DKPPP		0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	750.000,00							-	0,00	
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						750.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan			0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		kualitas layanan pendidikan dan kesehatan				
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	3 Laporan	750.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**50.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan						***50.000.000,00***								***0,00***	
		-						50.000.000,00						Masyarakat		0,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00							1 Unit	0,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						0,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pangan yang Tersedia														dan Perikanan
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						Masyarakat		0,00	
		-						50.000.000,00						Masyarakat		0,00	
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	-		-	1 unit	50.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**50.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat						***50.000.000,00***								***0,00***	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						50.000.000,00						masyarakat		0,00	
		-						50.000.000,00						masyarakat		0,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			-	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka						0,00						-		0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan															
		-						0,00						-		0,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	0,00							-	0,00	
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						0,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	0 Keluarga	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	0 laporan	0,00	Kab. Temanggung	-					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**80.000.000,00**								**0,00**	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat						***80.000.000,00***								***0,00***	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						20.000.000,00						DKPPP		0,00	
		-						20.000.000,00						DKPPP		0,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						20.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						60.000.000,00						masyarakat		0,00	
		-						60.000.000,00						masyarakat		0,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	60.000.000,00							5 Dokumen	0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**50.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan						***50.000.000,00***								***0,00***	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						pasar, SPPG, ritel		0,00	
		-						50.000.000,00						pasar, SPPG, ritel		0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**14.128.411.439,00**								**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**305.750.000,00**								**0,00**	
6.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**0,00**								**0,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap						***0,00***								***0,00***	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						0,00						-		0,00	
		-						0,00						-		0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	0,00							2 Kelompok	0,00	
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						0,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok		2 Kelompok	0 Kelompok	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Kelompok	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						0,00						POKDAKAN		0,00	
		-						0,00						POKDAKAN		0,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-		-	-	0,00							-	0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						0,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-		-	0.0 Unit	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						0,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		-						0,00						-		0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						0,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
7.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**265.750.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***265.750.000,00***								***0,00***	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						210.000.000,00						POKDAKAN		0,00	
		-						210.000.000,00						POKDAKAN		0,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3 Kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok	210.000.000,00							3 Kelompok	0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						210.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3 Kelompok		3 Kelompok	6 Kelompok	210.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Kelompok	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						55.750.000,00						POKDAKAN		0,00	
		-						55.750.000,00						POKDAKAN		0,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit		3 Unit	3 Unit	30.750.000,00							3 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00							1 Unit	0,00	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						30.750.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan			0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											ekonomi hijau, dan ekonomi biru		pendidikan dan kesehatan				
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit		3 Unit	1 Unit	30.750.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
8.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**30.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						***30.000.000,00***								***0,00***	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						30.000.000,00						Pokwasmas		0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						30.000.000,00						Pokwasmas		0,00	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	30.000.000,00							10 Pelaku Usaha	0,00	
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						30.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
9.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**10.000.000,00**								**0,00**	
			Jumlah produksi pengolahan ikan	-		-	395.76 Ton	10.000.000,00							-	0,00	
			-	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						0,00						-		0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-						0,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						0,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	0 Unit Usaha	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						10.000.000,00						poklahsar		0,00	
		-						10.000.000,00						poklahsar		0,00	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	0,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Ton	10.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**13.822.661.439,00**								**0,00**	
10.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**10.169.036.439,00**								**0,00**	
		Meningkatnya produksi, dan						***10.169.036.439,00***								***0,00***	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		kualitas hasil pertanian															
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						7.879.036.439,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
		-						7.879.036.439,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.155.655.000,00							1 Laporan	0,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.723.381.439,00							1 Laporan	0,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						6.723.381.439,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.723.381.439,00	Kab. Temanggung	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						1.155.655.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.155.655.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						2.290.000.000,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
		-						2.290.000.000,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.265.000.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	25.000.000,00							1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						2.265.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.265.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman						25.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	25.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**3.303.625.000,00**								**0,00**	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian						***3.278.625.000,00***								***0,00***	
		-						25.000.000,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						25.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						3.278.625.000,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
		-						3.278.625.000,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	3.183.625.000,00							4 Unit	0,00	
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00							4 Unit	0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit		5 Unit	5 Unit	60.000.000,00							5 Unit	0,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	10.000.000,00							4 Unit	0,00	
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00							1 Unit	0,00	
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						0,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit		4 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						3.183.625.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan			0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											ekonomi hijau, dan ekonomi biru		pendidikan dan kesehatan				
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit		4 Unit	9 Unit	3.183.625.000,00	Kab. Temanggung	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						10.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit		4 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
																	dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						60.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit		5 Unit	1 Unit	60.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan						25.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						25.000.000,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
		-						25.000.000,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	-		-	-	0,00							-	0,00	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						0,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	-		-	0 Ha	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota						0,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan			0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
													kualitas layanan pendidikan dan kesehatan				
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		-						3.278.625.000,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						0,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
12.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**250.000.000,00**								**0,00**	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner						***250.000.000,00***								***0,00***	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00						Masyarakat		0,00	
		-						150.000.000,00						Masyarakat		0,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	150.000.000,00							20 Laporan	0,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan			0,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	20 Laporan		20 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						Masyarakat		0,00	
		-						100.000.000,00						Masyarakat		0,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan		1 Laporan	1000 Laporan	100.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		-						100.000.000,00						Masyarakat		0,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium						0,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan			0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		kualitas layanan pendidikan dan kesehatan				
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
13.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**50.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						***50.000.000,00***								***0,00***	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						50.000.000,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
		-						50.000.000,00						Kelompok Tani/Gapoktan/KWT		0,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha		Ha	Ha	0,00							2 Ha	0,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	35 Ha		50 Ha	50 Ha	50.000.000,00							35 Ha	0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	35 Ha		50 Ha	20 Ha	50.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					35 Ha	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						0,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha		Ha	1 Ha	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Ha	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
14.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**50.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani						***50.000.000,00***								***0,00***	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						50.000.000,00						kelompok tani		0,00	
		-						50.000.000,00						kelompok tani		0,00	
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00							3 Dokumen	0,00	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	4 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		-						50.000.000,00						kelompok tani		0,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	0,00							-	0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	-	0,00							-	0,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						0,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa						0,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	0,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	JUMLAH							**40.043.454.559,00**								**0,00**	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temangung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi meliputi penambahan pagu untuk pokok pikiran DPRD dan aspirasi bupati.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananKab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA TAHUN 2027			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG	
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TARGET 2027	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET 2027
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	**26.300.793.120,00**	**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**	**40.043.454.559,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**25.915.043.120,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**25.915.043.120,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**25.915.043.120,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**25.915.043.120,00**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.685.043.120,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.685.043.120,00**
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	***25.644.293.120,00***	***Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian***	***25.644.293.120,00***
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***1.500.000,00***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***1.500.000,00***
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*750.000,00*	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**23.755.118.943,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.755.118.943,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.755.118.943,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.755.118.943,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**165.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**185.000.000,00**
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00

RANCANGAN RENJA TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG	
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TARGET 2027		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET 2027
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**53.500.000,00**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**63.500.000,00**
	Pengadaan Mebel	33.500.000,00		Pengadaan Mebel	33.500.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.439.924.177**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.403.924.177,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.308.424.177		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.272.424.177,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**270.000.000,00**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**276.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**50.000.000,00**		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**50.000.000,00**
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	***50.000.000,00***		**Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**	**50.000.000,00**
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0,00		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0,00

RANCANGAN RENJA TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG	
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TARGET 2027		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET 2027
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**50.000.000,00**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**
	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000,00		Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
3.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**50.000.000,00**		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**50.000.000,00**
	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	***50.000.000,00***		**Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat**	**50.000.000,00**
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**50.000.000,00**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**50.000.000,00**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.000.000,00		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	50.000.000,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0,00		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0,00
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0,00		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0,00
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	0,00		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	0,00
	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	0,00		Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	0,00
4.	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**80.000.000,00**		**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**80.000.000,00**
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat	***80.000.000,00***		**Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat**	**80.000.000,00**
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**20.000.000,00**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**20.000.000,00**

RANCANGAN RENJA TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG	
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TARGET 2027		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET 2027
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000,00		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	20.000.000,00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**60.000.000,00**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**60.000.000,00**
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00
5.	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**50.000.000,00**		**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**50.000.000,00**
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	***50.000.000,00***		**Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan**	**50.000.000,00**
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**50.000.000,00**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**14.128.411.439,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**14.128.411.439,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**145.750.000**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**305.750.000,00**
6.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**0,00**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**0,00**
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	***0,00***		**Meningkatnya produksi perikanan tangkap**	**0,00**
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**0,00**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	0,00		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	0,00
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0,00		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0,00

RANCANGAN RENJA TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG	
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TARGET 2027		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET 2027
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0,00		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0,00
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	0,00		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	0,00
7.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**105.750.000**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**265.750.000,00**
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	**50.000.000,00**		**Meningkatnya produksi perikanan budidaya**	**265.750.000,00**
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**50.000.000,00**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**210.000.000,00**
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000,00		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	210.000.000,00
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**55.750.000,00**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**55.750.000,00**
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.750.000,00		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.750.000,00
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00
8.	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**30.000.000,00**		**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**30.000.000,00**
	Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	***30.000.000,00***		**Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan**	**30.000.000,00**
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**30.000.000,00**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**30.000.000,00**
	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	30.000.000,00		Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	30.000.000,00
9.	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**10.000.000,00**		**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**10.000.000,00**
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**0,00**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**0,00**

RANCANGAN RENJA TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG	
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TARGET 2027		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET 2027
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0,00		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0,00
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**10.000.000,00**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**10.000.000,00**
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**470.000.000**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**13.822.661.439,00**
10.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	300.000.000		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**10.169.036.439,00**
	Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	300.000.000		**Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian**	**10.169.036.439,00**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	300.000.000		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**7.879.036.439,00**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	200.000.000,00		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.723.381.439,00
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10.000.000,00		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.155.655.000,00
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**90.000.000,00**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**2.290.000.000,00**
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	65.000.000,00		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.265.000.000,00
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	25.000.000,00		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	25.000.000,00
11.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**120.000.000,00**		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.303.625.000,00
	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	***120.000.000,00***		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.278.625.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	25.000.000,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	25.000.000,00

RANCANGAN RENJA TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG	
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TARGET 2027		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET 2027
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**95.000.000,00**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**3.278.625.000,00**
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,00		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.183.625.000,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	10.000.000,00		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	10.000.000,00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	60.000.000,00		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	60.000.000,00
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	25.000.000,00		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	25.000.000,00
	Pengembangan Prasarana Pertanian	0,00		Pengembangan Prasarana Pertanian	25.000.000,00
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	0,00		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	0,00
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	0,00		Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	0,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0,00		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0,00
12.	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**250.000.000,00**		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**250.000.000,00**
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	***250.000.000,00***		**Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**	**250.000.000,00**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**150.000.000,00**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**150.000.000,00**

RANCANGAN RENJA TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG	
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	TARGET 2027		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET 2027
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**100.000.000,00**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000,00**
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100.000.000,00		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100.000.000,00
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	0,00		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	0,00
13.	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**50.000.000,00**		**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**50.000.000,00**
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	***50.000.000,00***		**Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**50.000.000,00**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**50.000.000,00**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**50.000.000,00**
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000,00		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000,00
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00
14.	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**50.000.000,00**		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**50.000.000,00**
	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	***50.000.000,00***		**Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani**	**50.000.000,00**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**50.000.000,00**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**50.000.000,00**
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	50.000.000,00		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	50.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	0,00		Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	0,00
	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	0,00		Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	0,00

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temangung Tahun 2027

Dari Tabel 4.3. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2027 sebesar Rp 13.212.661.439 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan dikarenakan penambahan pagu sumber anggaran DAK Fisik, penambahan pagu sumber anggaran DBHCHT dan penambahan anggaran dari pokok pikiran DPRD dan aspirasi Bupati.

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
V	**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**				
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
Urusan Pemerintahan Pilihan					
	Urusan Pangan				
	Indeks Ketahanan pangan	angka		79,9	DKPPP
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	**%**	11.23	8,88	DKPPP
	Urusan Kelautan dan Perikanan				
1	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	22.27	22,41	DKPPP
	Urusan Pertanian				
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	23.1	22,3	DKPPP
	Urusan Penunjang				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	angka	86.63	86	DKPPP
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	angka	74.80	74,9	DKPPP

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananKab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2.

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								
9	Pangan	9	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Target Jumlah Cadangan Pangan	%	26,89		DKPPP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
25	Kelautan dan Perikanan	81	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Produksi Perikanan tangkap dan budidaya (ton) Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	%	100	100	DKPPP
			Angka Konsumsi ikan (Kg/KAP/TH)	Angka KI= Angka KRT+Angka KLRT+Angka KTT	kg/kap/thn	22.27	22,41	
27	Pertanian	27	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun Luas Panen	Ton/ha	6.09	6.17	DKPPP
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1 Produksi tanaman pangan tahun N-1	%	10.37	10.25	DKPPP
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1 Produksi hortikultura tahun N-1	%	1.04	1	DKPPP
			Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	%	8.62	8	DKPPP
				Produksi komoditas peternakan tahun N-1	%			
			Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	95.4	90	DKPPP

BAB VI
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananTahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananTahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 96.22%, realisasi Belanja Modal sebesar 81.57%. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 7.71 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 40.063.454.559,- yang terdiri dari 14 program antara lain Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Program

Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2027 ini, maka diharapkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 17 Juli 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kabupaten Temanggung,

JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197106301998031005